



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai salah satu instrument dalam upaya untuk mewujudkan Pembangunan yang tepat sasaran dan terukur di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya. Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun pertama periode 2023-2026 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD), baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna. Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh.



Payakumbuh, Desember 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh

FUNIDA FATWA, S.Sos,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670601 198809 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Aspek Strategi Organisasi	2
1.3 Isu Strategis	30
1.5 Landasan Hukum	30
1.6 Sistematika	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA	33
2.1 RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	33
2.2 Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	33
2.3 Indikator Kinerja Utama	37
2.4 Perjanjian Kinerja 2024	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	47
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	47
3.2 Analisis Capaian Kinerja	49
3.3 Realisasi Anggaran	122
3.4 Prestasi dan Penghargaan	136
BAB IV PENUTUP	138
4.1 Kesimpulan	138
4.2 Permasalahan	138
4.3 Tindak Lanjut	139
LAMPIRAN	141
1) Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
2) RKT Tahun 2024	
3) SK IKU Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2023-2026	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Berdasarkan Pangkat/Golongan	3
Tabel 1.2	: Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Berdasarkan Pendidikan	4
Tabel 1.3	: Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	25
Tabel 1.4	: Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	26
Tabel 1.5	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	29
Tabel 2.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	35
Tabel 2.2	: Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	36
Tabel 2.3	: Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	39
Tabel 2.4	: Formula Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	40
Tabel 2.5	: Perjanjian Kinerja Tahun 2024	41
Tabel 2.6	: Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Tahun 2024	42
Tabel 3.1	: Skala Pengukuran Kinerja	47
Tabel 3.2	: Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024	48
Tabel 3.3	: Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024	50
Tabel 3.4	: Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022-2024	66

Tabel 3.5	: Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Target Akhir 2024	66
Tabel 3.6	: Perbandingan Capaian IKU Sasran Strategis 1 Tahun 2024 dengan Standar Nasional	67
Tabel 3.7	: Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2024 .	69
Tabel 3.8	: Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Tahun 2024	71
Tabel 3.9	: Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan	72
Tabel 3.10	: Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024	74
Tabel 3.11	: Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022-2024	107
Tabel 3.12	: Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Target 2024	108
Tabel 3.13	: Perbandingan Capaian IKU Sasaran Strategis 2 Tahun 2024 dengan Standar Nasional	108
Tabel 3.14	: Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2024 ..	111
Tabel 3.15	: Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Tahun 2024	112
Tabel 3.16	: Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan	113
Tabel 3.17	: Data Perkembangan Usaha Industri Kota Payakumbuh Tahun 2019-2024	114
Tabel 3.18	: Jumlah Usaha Industri Berdasarkan Klasifikasi Usaha .	115
Tabel 3.19	: Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024	117
Tabel 3.20	: Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022-2024	118
Tabel 3.21	: Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Target Tahun 2024	118
Tabel 3.22	: Perbandingan Capaian IKU Sasran Strategis 3 Tahun 2024 dengan Standar Nasional	119
Tabel 3.23	: Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Tahun 2024	120
Tabel 3.24	: Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan	121
Tabel 3.25	: Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024	123
Tabel 3.26	: Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	127

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	: PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan	3
Grafik 1.2	: PNS Berdasarkan Pendidikan	4
Grafik 3.1	: Perbandingan Penyerapan Tenaga Kerja	51
Grafik 3.2	: Jumlah Usaha Industri Berdasarkan Klasifikasi Usaha .	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan Negara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah wajib menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang mendasari pada perencanaan dan hasil pada ketetapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan SKPD diharuskan untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah Negara, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Hal tersebut di mulai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra).

Dalam rangka menghasilkan data yang berkualitas, tepat waktu dan akuntabel. Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Tahun 2023-2026. Renstra mengalami pengembangan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran. Pemerintah Daerah harus memperhatikan

keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024 disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran yang digunakan serta pencapaian tujuan, sasaran-sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dan Renstra Tahun 2023-2026.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024 dengan harapan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat kerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
2. Mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Aspek Strategi Organisasi

Aspek strategis organisasi yang berpengaruh kepada peran dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1.2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

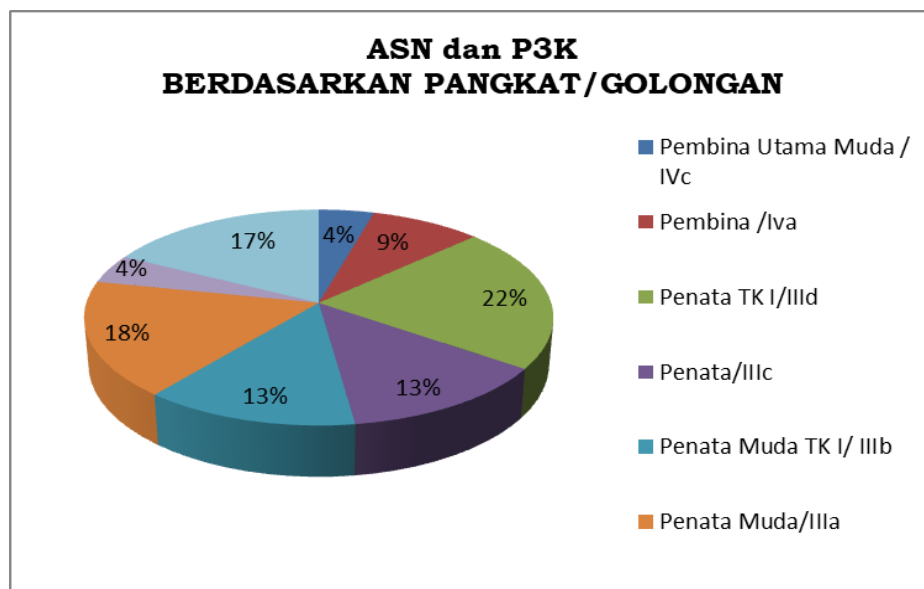
Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada Tahun 2024 sebanyak 23 (Dua puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan P3K yang terdiri dari 11 (Sebelas) orang laki-laki dan 12 (Dua belas) orang perempuan dengan status

kepegawaian dan strata/jenjang pendidikan mulai dari SMA hingga S-2. Berikut data kepegawaian seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan P3K
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Pangkat/Gol	Sekretariat		Bidang Tenaga Kerja		Bidang Perindustrian		UPTD		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Pembina Utama Muda / IVc		1								1	1
Pembina /Iva	1			1					1	1	2
Penata TK I/IIIId		2	1		1	1			2	3	5
Penata/IIIc			1	1			1		2	1	3
Penata Muda TK I/ IIIb	1	1					1		2	1	3
Penata Muda/IIIa		2				1				3	3
Pengatur TK I /IIId	1								1		1
PPPK-09					1				1		1
PPPK-07	1	1					1	1	2	2	4
Jumlah	4	7	2	2	2	2	3	1	11	12	23

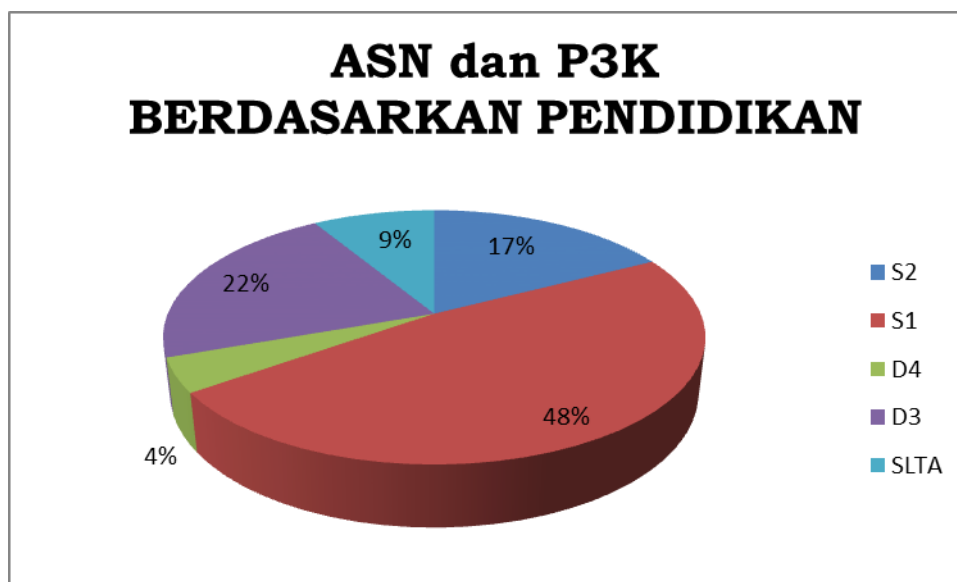
Grafik. 1.1



Tabel 1.2
 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan P3K
 Berdasarkan Pendidikan
 Dinas Tenaga Kerjadan Perindustrian Kota Payakumbuh

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Tenaga Kerja		Bidang Perindustrian		UPTD P3R		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
S2		1	1			1	1		2	2	4
S1	2	4	1	2	2				5	6	11
D4						1				1	1
D3	1	1					2	1	3	2	5
SLTA	1	1							1	1	2
Jumlah	4	7	2	2	2	2	3	1	11	12	23

Grafik 1.2



1.2.2 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

1) Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh merupakan unsur pelaksana bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Tenaga Kerja
4. Bidang Perindustrian
5. UPTD P3R

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh diatur dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian;
- Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian;

- Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok :

Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris Dinas

Tugas :

Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
- c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaa, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas agar efektif dan efisien;

- e. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas yang berlaku;
 - f. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler lingkup Dinas;
 - h. Menganalisa kebutuhan personel untuk masing-masing bidang dan melakukan pengurusan administrasi kepegawaian personel lingkup Dinas;
 - i. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di sub bagian;
 - j. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - o. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bagian Program dan Keuangan
- Uraian Tugas :
- a. Menghimpun dan menyusun rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja Dinas;

- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas;
- c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Menghimpun dan menyusun setiap bidang dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya;
- e. Menghimpun, memadurasi dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang;
- f. Menghimpun, menyusun dan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di sub bagian;
- g. Menghimpun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari setiap bidang;
- h. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- i. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Panjar, Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang dan Surat Perintah Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- j. Menyiapkan Surat Perintah Membayar lingkup Dinas;

- k. Menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan Dinas dan kesejahteraan pegawai;
- l. Mengoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Dinas;
- m. Menyelenggarakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan akuntansi dan pelaporan;
- n. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personel pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
- o. Menyiapkan bahan serta memfasilitasi kegiatan pengawasan oleh fungsional pengawas;
- p. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- s. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- t. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Tenaga Kerja

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang Tenaga Kerja.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Tenaga Kerja;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang Tenaga Kerja;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Tenaga Kerja;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang Tenaga Kerja;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Tenaga Kerja terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi, yaitu :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Sub Substansi Pelatihan Tenaga Kerja

Uraian Tugas :

- a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
- b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
- c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Melaksanakan sosialisasi program dan kegiatan pelatihan;
- e. Melakukan koordinasi dengan BLK dan lembaga pelatihan lainnya;
- f. Menyusun rencana dan kegiatan pemagangan melaksanakan seleksi terhadap peserta pemagangan;
- g. Melakukan pembinaan organisasi, memberikan perizinan dan rekomendasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;

- h. Melakukan pendataan dan pemantauan pekerjaan yang dilakukan peserta pasca pelatihan dan pemagangan;
 - i. Melakukan pendataan dan pemantauan hasil pelatihan dan pemagangan yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 - j. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 - k. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - l. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - m. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
 - n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - p. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Sub Substansi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- Uraian Tugas :
- a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
 - b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

- evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
- c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - d. Menyiapkan bahan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sesuai lingkup tugasnya;
 - e. Melakukan pendataan dan pelayanan pembuatan AK I sampai dengan AK V;
 - f. Menyusun laporan dan informasi Pencari Kerja;
 - g. Melaksanakan bimbingan kewirausahaan dan tenaga kerja swasta;
 - h. Menyusun data dan naskah informasi lowongan kerja dalam dan luar negeri;
 - i. Menyebarluaskan informasi lowongan kerja;
 - j. Memproses permintaan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri;
 - k. Melaksanakan seleksi dan pelayanan administrasi terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia;
 - l. Merancang dan memfasilitasi penempatan tenaga kerja luar provinsi/luar negeri;
 - m. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bursa kerja dan penempatan tenaga kerja;
 - n. Melaksanakan kegiatan padat karya produktif/infrastruktur;
 - o. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 - p. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - q. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - r. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;

- s. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - t. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - u. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - v. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 - w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Sub Substansi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
- Uraian Tugas :
- a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
 - b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
 - c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - d. Menyiapkan bahan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sesuai lingkup tugasnya;
 - e. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja;
 - f. Melakukan pembinaan terhadap organisasi Pekerja/Serikat Pekerja dan Serikat Buruh dan

- melakukan pencatatan pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- g. Melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap organisasi Pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Lembaga Kerjasama BIPARTIT dan Lembaga Kerjasama TRIPARTIT;
 - h. Melakukan pembinaan dan pengesahan serta pemeriksaan berkala tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Wajib Lapo Ketenagakerjaan;
 - i. Memfasilitasi setiap tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial, melalui mediasi, arbitrase, konsiliasi dan pengadilan hubungan industrial;
 - j. Memfasilitasi setiap permasalahan berkaitan dengan unjuk rasa, mogok kerja dan pemutusan hubungan kerja;
 - k. Melakukan pembinaan berkaitan dengan sarana hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - l. Memfasilitasi orang terlantar dalam perjalanan antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi;
 - m. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 - n. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - o. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - p. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
 - q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- s. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- t. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perindustrian

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Industri;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang Industri;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Industri;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang Industri;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi, yaitu:

1) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian Sub Substansi Industri Pangan

Uraian Tugas :

- a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
- b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;

- c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Membantu koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri;
- e. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri pangan;
- f. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri pangan;
- g. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri pangan dan peran serta masyarakat;
- h. Membantu koordinasi dengan stakeholder terkait Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri yang lokasinya di Kota Payakumbuh untuk industri pangan;
- i. Memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- j. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
- k. Membantu koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri pangan;
- l. Menyediakan informasi industri untuk Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri kewenangan Kabupaten/Kota;

- m. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data Sistem Informasi Industri Nasional;
- n. Membantu diseminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten/Kota;
- o. Membantu koordinasi pembinaan pengembangan, promosi dan pemasaran produk-produk industri pangan;
- p. Memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri pangan;
- q. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan industri pangan;
- r. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
- s. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
- t. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- u. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
- v. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- w. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- x. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- y. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Sandang dan Kerajinan

Uraian Tugas :

- a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
- b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
- c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Membantu koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri sandang dan kerajinan;
- e. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri sandang dan kerajinan;
- f. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri;
- g. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri sandang dan kerajinan dan peran serta masyarakat;
- h. Membantu koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri sandang dan kerajinan;
- i. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data Sistem Informasi Industri Nasional;
- j. Membantu koordinasi dengan stakeholder terkait Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri

yang lokasinya di Kota Payakumbuh untuk industri sandang dan kerajinan;

- k. Memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- l. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
- m. Menyediakan informasi industri untuk Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
- n. Membantu diseminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten/Kota;
- o. Membantu koordinasi pembinaan pengembangan, promosi dan pemasaran produk-produk industri sandang dan kerajinan;
- p. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana bagi industri sandang dan kerajinan;
- q. Memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri sandang dan kerajinan;
- r. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
- s. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
- t. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- u. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
- v. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- w. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - x. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - y. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 - z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Logam, Elektronika, Kimia dan Bahan Bangunan
- Uraian Tugas:
- a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
 - b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
 - c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - d. Membantu koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
 - e. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
 - f. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;

- g. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan dan peran serta masyarakat;
- h. Menyelenggarakan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan, pedoman dan dampak lingkungan dari hasil industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- i. Membantu koordinasi dengan stakeholder terkait Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri yang lokasinya di Kota Payakumbuh untuk industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- j. Memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- k. Mengoordinasi dan menyinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
- l. Membantu koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- m. Menyediakan informasi industri untuk Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
- n. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data Sistem Informasi Industri Nasional;
- o. Membantu diseminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten/Kota;
- p. Membantu koordinasi pembinaan pengembangan, promosi dan pemasaran produk-produk industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;

- q. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana bagi industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
 - r. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
 - s. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan terkait pembinaan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
 - t. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 - u. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - v. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - w. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
 - x. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - y. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - z. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - å. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 - ä. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R)
Tugas :
Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kota Payakumbuh dibidang Pelayanan dan Pengembangan Rendang.

Fungsi :

- a. Penggerakan pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
- b. Penggerakan peran serta dan pemberdayaan IKM;
- c. Pelaksanaan Pelayanan dan Pengembangan Rendang di Kota Payakumbuh.

UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R) mempunyai :

- 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas :

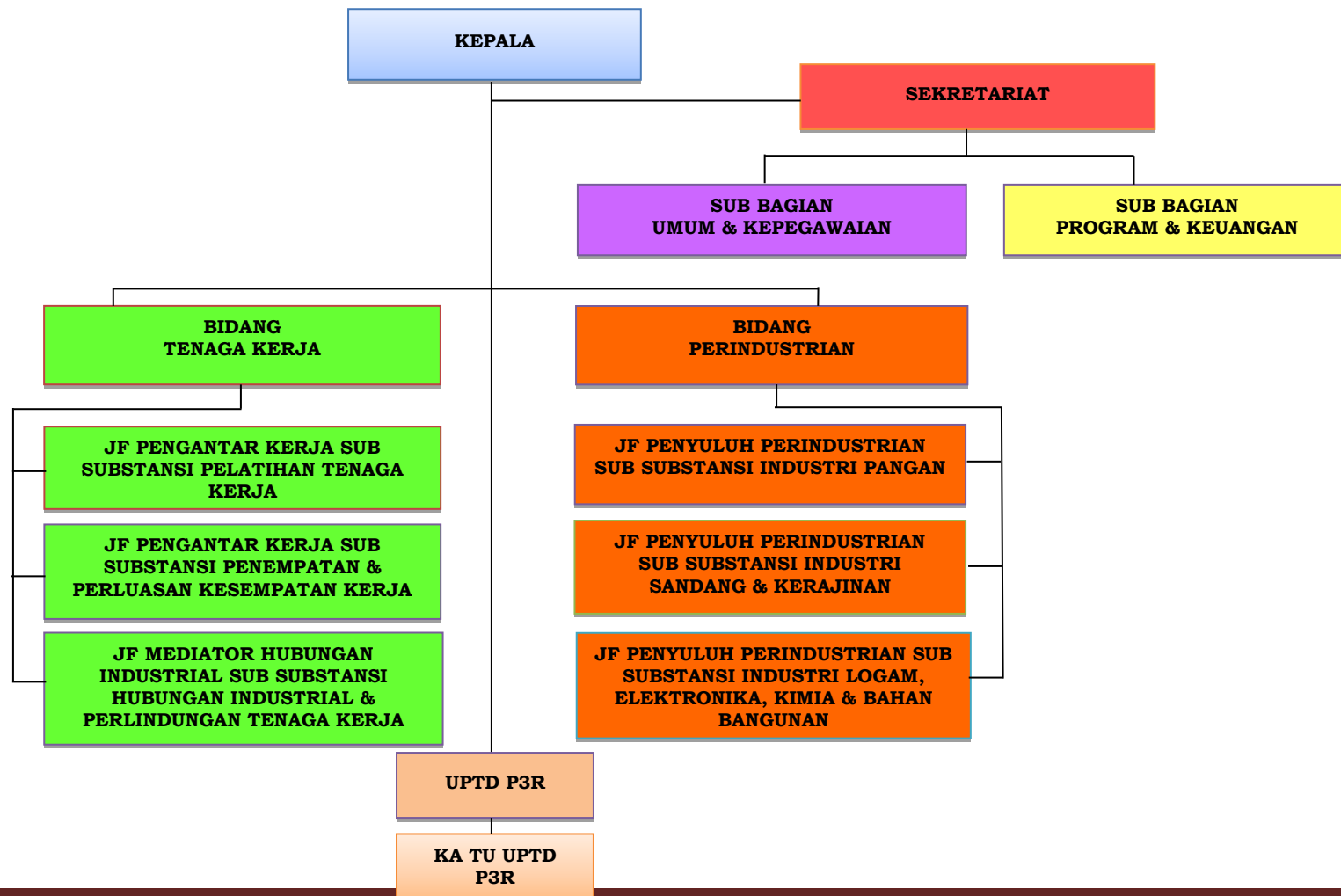
Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Fungsi :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat;
- b. Menyusun dan mengelola administrasi pelayanan seperti SOP, Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survey Kepuasan Masyarakat dan Mekanisme Pengaduan;
- c. Mengelola administrasi umum dan kearsipan meliputi pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat;
- d. Mengelola administrasi kepegawaian;
- e. Mengelola administrasi keuangan;
- f. Mengelola administrasi inventaris Barang dan Asset Milik Daerah;
- g. Menyusun laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH



1.2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024 didukung dengan aspek sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabelberikut ini :

Tabe 1.4
Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
KotaPayakumbuh

No	JenisBarang	Jumlah	Keterangan	Kondisi Asset (Baik/Rusak)
1	Gedung	1	Dinas UPTD Sentra Rendang	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 4	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 2	11	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9 Baik/2 Rusak Ringan
4	Mesin Absen	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/1 Rusak Ringan
5	Filling Kabinet Besi	8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3 Baik/5 Berat Berat
6	CCTV	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
7	Papan visual/papan nama	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
8	Papan Tulis	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
9	LCD Proyektor/Infocus	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/ Rusak Berat
10	Papan Gambar	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
11	Lemari Kayu	11	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/7 Rusak Ringan
12	Kursi Besi/Metal	23	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik

No	JenisBarang	Jumlah	Keterangan	Kondisi Asset (Baik/Rusak)
13	MejaRapat	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
14	MejaResepsionis	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
15	Kursi Tamu	9	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	5 Baik/4 Rusak Ringan
16	Kursi Putar	14	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	10 Baik/4 Rusak Ringan
17	Kursi Biasa	7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/3 Rusak Ringan
18	Meja Kumputer	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Berat
19	Meja ½ Biro	21	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/20 Rusak Ringan
20	Lemari Es	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
21	AC	8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	6 Baik/2 Rusak Ringan
22	Televisi	5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/1 Rusak Ringan
23	Sound System	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 Baik/1 Rusak Ringan
24	Wireless	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Ringan
25	Kamera Video/CCTV	12	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8 Baik/4 Rusak Ringan
26	Handy Cam	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Berat
27	Karpet	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
28	Hidran Kebakaran	14	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
29	P.C Unit	20	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	11 Baik/9 Rusak Ringan

No	JenisBarang	Jumlah	Keterangan	Kondisi Asset (Baik/Rusak)
30	Laptop	7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/3 Rusak Berat
31	Note Book	5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3 Baik/2 Rusak Berat
32	Hard Disk	5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/4 Rusak Berat
33	Printer	22	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	13 Baik/6 Rusak Ringan/3 Rusak Berat
34	Scanner	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
35	External/Portable Hardisk	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Berat
36	Meja Kerja Pejabat eselon II, III, IV	10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/6 Rusak Ringan
37	Kursi Kerja Pejabat eselon II, IV	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
38	Kursi Tamu	9	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	5 Baik/4 Rusak Ringan
39	Kamera Digital	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Berat
40	Digital LED Running Text	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
41	Sofa	4	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
42	Camera Film	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/ 1 Rusak Berat
43	Lemari Arsip Rak Besi	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik
44	Lemari Rak Besi	5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	5 Baik

Sumber Data : Buku Inventaris Disnakerperin

1.2.3. Anggaran/Pembiayaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh didukung oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh. Alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.5
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	6.136.588.133,-	6.397.643.422,-	261.055.289,-
5.1.01	Belanja Pegawai	2.639.142.952,-	2.570.380.063,-	(68.762.889,-)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.497.445.181,-	3.827.263.359,-	329.818.178,-
5.2	Belanja Modal	164.867.800,-	246.217.700,-	81.349.900,-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.207.800,-	229.229.700,-	71.021.900,-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	5.000.000,-	5.000.000,-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.660.000,-	11.988.000,-	5.328.000,-
	Jumlah Belanja	6.301.455.933,-	6.643.861.122,-	342.405.189,-
	Total Surplus/ Defisit	(6.301.455.933,-)	(6.643.861.122,-)	(342.405.189,-)

1.3. Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak, termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak belakunya pembatasan aktifitas, termasuk perekonomian. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih mengalami kontraksi sampai Tahun 2024. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan, tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya.

Isu stragtegis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama 5 tahun. Identifikasi isu strategis urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian sebagai berikut :

1. Masih rendahnya serapan tenaga kerja;
2. Masih rendahnya produksi industri pengolahan.

1.4. Landasan Hukum

LKjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

1.5. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Isu Strategis) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis OPD Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan mempedomani dokumen perencanaan (Sebelum direviu dan setelah direviu).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
8. Seluruh capaian kinerja agar dilengkapi dengan dokumen foto.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan sasaran strategis dan persentase capaian kinerja keuangan organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Capaian Prestasi dan Penghargaan

Capaian prestasi dan penghargaan dilengkapi dengan dokumen foto dan penjelasan mengenai prestasi dan penghargaan yang diterima.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

2.1.1. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. 5 (lima) Tujuan Kota Payakumbuh yang terkait Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh terdapat pada Tujuan 2 yaitu :

“Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”

2.1.2. Sasaran

Untuk merealisasikan Tujuan yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh pemangku kepentingan, 12 Sasaran Kota Payakumbuh yang menjadi Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yaitu :

Sasaran 4 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Sasaran 5 : Meningkatnya Sektor Strategis

Dengan memperhatikan penjabaran Sasaran Walikota Kota Payakumbuh, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan Sasaran 4 dan Sasaran 5

2.2. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh 2023-2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

disesuaikan dengan sasaran dan indikator pada urusan tenaga kerja dan perindustrian. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh serta berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

2.2.1. Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya maka isu-isu strategis yang ada dibidang tenaga kerja dan perindustrian sebagai berikut :

1. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja;
2. Masih rendahnya produksi industri pengolahan.

2.2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, sebagai berikut :

1. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran;
2. Meningkatnya sektor strategis.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat melaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Dengan mengacu pada tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya serapan tenaga kerja;
2. Meningkatnya produksi industri pengolahan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun				Kondisi Akhir
							2023	2024	2025	2026	
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	95,16	93,75	93,75	93,77	93,77	93,77
2	Meningkatnya Sektor Strategis	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	5,63	3,00	3,25	3,30	3,35	3,35
3	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A	A

2.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah yang berisikan program prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 4 tahun periode Renstra. Adapun strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
Tahun 2023-2026

Tujuan RPD	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		
Sasaran RPD	1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	1. Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	1. Meningkatkan Upaya Penurunan Angka Pengangguran	1. Meningkatkan Kualitas, Produktivitas dan Kesempatan Kerja
			2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Angkatan Kerja yang Berbasis Digital dan Teknologi Untuk Memenuhi Kebutuhan Pasar
			3. Mengembangkan Klaster Industri, Kemitraan dan Pemanfaatan Teknologi Untuk Menyerap Tenaga Kerja
			4. Pelaksanaan Inkubasi Bisnis Penciptaan Pengusaha Muda Baru Sebagai Skema Pemulihan Ekonomi
			5. Menciptakan Entrepeneur Dari Berbagai Sektor

Sasaran RPD	2. Meningkatnya Sektor Strategis		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Sektor Industri	1. Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri	1. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Industri Berbasis Sumberdaya Lokal
		2. Meningkatnya SDM Pelaku Industri	2. Peningkatan Keahlian dan Keterampilan bagi Pelaku Industri Kecil
		3. Meningkatkan Penerapan Standarisasi Mutu Produk	3. Menyediakan SDM Pelaku Industri yang Berkualitas
		4. Meningkatkan Penerapan Teknologi	4. Memberikan Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk
		5. Meningkatkan Kualitas Input Industri	5. Mendorong dan Mendukung Kerjasama Penerapan Teknologi, inovasi dan Peningkatan Kreativitas Pelaku Usaha Industri
		6. Meningkatkan Pengawasan Usaha Industri	6. Membangun Peta Potensi Sumber Daya Alam yang Berkualitas
		7. Meningkatkan Entrepreneurship	7. Menyediakan Sarana dan Prasarana Penunjang Peningkatan Produksi
		8. Merumuskan Kebijakan Penanaman Modal Terutama Pembiayaan Produksi	

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijadikan dasar dalam penilaian kinerja atas pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan sejalan dengan Renstra

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026
sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	95,16	93,75	93,75	93,77	93,77	93,77
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	5,63	3,00	3,25	3,30	3,35	3,35
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A	A

Tabel 2.4
Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Formula
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	Memenuhi SPM Kementerian Ketenagakerjaan	Jumlah penduduk usia kerja yang bekerja pada tahun n di bagi jumlah angkatan kerja tahun n kali seratus persen
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	Memenuhi SPM Kementerian Perindustrian	Nilai Produksi Th (n) - Nilai Produksi Th (n-1) dibagi Nilai Produksi Th (n-1) kali seratus persen
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menjadi Salah Satu Tolak Ukur Dalam Penyelenggaraan Pemerintah	

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah Perjanjian Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,75%
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,25%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	A

Anggaran belanja langsung Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.6
 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Anggaran
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan	1.211.831.900	1.142.759.555	94,30
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	28.760.200	27.285.610	94,87
			Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	78.472.700	73.578.095	93,76
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	60.811.758	58.243.873	95,78
			Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.537.850	21.790.358	92,58

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Anggaran
					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.200.900	3.573.645	85,07
Jumlah Anggaran Sasaran 1						1.407.615.308	1.327.231.136	94,29
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran Dan Perwilayahan Industri	649.650.792	631.978.238	97,28
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	35.160.200	33.595.815	95,55
					Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	528.518.606	498.000.023	94,23
					Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	452.343.758	425.445.006	94,05
			Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan	61.899.300	58.611.695	94,69

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Anggaran
				Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS) RBA			
			Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Untuk Informasi Industri Untuk IUI,IUKI DAN IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	78.696.950	68.592.385	87,16
Jumlah Anggaran Sasaran 2						1.806.269.606	1.716.223.162	95,01
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.266.200	16.926.500	87,86
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.642.250	65.074.600	97,65
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.455.472.713	1.977.072.836	80,52
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	115.300.650	115.104.000	99,83

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Anggaran
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.920.000	7.800.000	98,48
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.988.350	1.722.600	86,63
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.000.000	21.150.000	91,96
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.846.100	20.702.500	86,82
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.389.700	16.479.280	84,99
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.016.800	5.640.000	93,74
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.530.000	2.003.925	79,21
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.468.000	194.430.245	99,98
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.842.500	98.100.000	99,25
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.681.200	150.461.080	89,20

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Anggaran
				Pemerintahan Daerah				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.331.745	110.930.293	99,64
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	38.904.864	99,27
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.350.000	63.977.060	96,42
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.740.000	9.440.000	96,92
Jumlah Anggaran Sasaran 3						3.429.976.208	2.915.919.783	85,01

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa kinerja financial organisasi dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antar target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja adalah kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (Penentuan posisi sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 91	Sangat Baik
2	76,00 – 90,99	Baik
3	66,00 – 75,99	Cukup
4	51,00 – 65,99	Kurang
5	$\leq 50,99$	Sangat Kurang

Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian kelompok indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPD Tahun 2023-2026 yang terdapat pada :

Sasaran 4 : Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran

Sasaran 5 : Meningkatnya sektor strategis

Adapun analisa dari sasaran strategis tersebut dalam mencapai Tujuan Walikota serta Tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Perjanjian Kinerja
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Kriteria Kinerja
Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	93,75	95,13	101,47	Sangat Baik
Meningkatnya Sektor Strategis	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	3,25	6	184,62	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai	A	A	100	Sangat Baik

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 6.643.861.122,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2024 : Rp. 5.959.374.081,-

Persentase : 89,70%

Dari tabel diatas, ketiga sasaran strategis yang terbagi dalam tiga indikator kinerja. Pada Tahun 2024, 2 indikator telah melebihi target yang ditetapkan dan satu indikator sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian yang tertinggi pada indiktor Persentase Peningkatan Nilai Produksi

dengan capaian 184,62%, diikuti indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja dengan capaian 101,47% dan indikator Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat dengan capaian 100%.

Dari capaian Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang melebihi target, diharapkan ke depannya program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tetap berlanjut dengan capaian yang lebih baik lagi.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 melalui 3 (Tiga) sasaran dan 3 (Tiga) indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 3 (Tiga) sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja

Sasaran strategis ini merupakan salah satu komponen upaya mencapai tujuan Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. Hal-hal yang mendorong sasaran ini berkaitan dengan peningkatan serapan tenaga kerja melalui yaitu :

1. Pelatihan kerja
2. Pemagangan
3. Fasilitasi penempatan tenaga kerja

Upaya ini dilakukan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil dan mandiri. Melalui kegiatan ini diharapkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja meningkat sehingga mampu berkompetisi di pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.

Untuk mengukur tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria Kinerja
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,75%	95,13%	101,47%	Sangat Baik

Dengan rumus perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah penduduk usia kerja yang bekerja Tahun 2024}}{\text{Jumlah angkatan kerja Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$= \frac{74.085}{77.876} \times 100\%$$

$$= \mathbf{95,13\%}$$

Data Ketenagakerjaan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2024

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
Angkatan Kerja	77.907	77.876
Bekerja	74.137	74.085
Penganggur	3.770	3.791
Bukan Angkatan Kerja	30.515	32.544
Sekolah	9.796	9.015
Mengurus Rumah Tangga	16.037	17.935

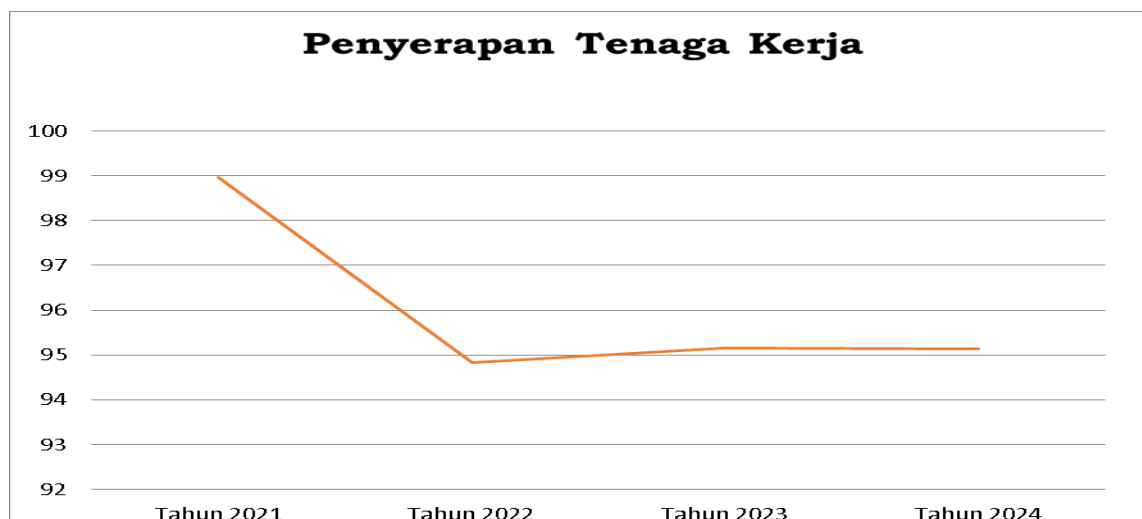
Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
Lainnya	4.682	5.594
Penduduk Usia Kerja	108.422	110.420
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,86	70,53
Tingkat Penganggur (%)	4,84	4,87

Sumber Data : Kota Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2025

Sasaran Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel diatas mempunyai 1 (Satu) indikator diperoleh melebihi dari target. Indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja realisasi sebesar 95,13% dari target sebesar 93,75% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, adapun persentase capaian kinerjanya 101,47% dengan tingkat capaian melebihi target dalam kriteria Sangat Baik.

Rumusan indikator didapat dari kenaikan jumlah penduduk usia kerja pada Tahun 2023 sebanyak 108.422 orang sedangkan Tahun 2024 jumlah penduduk usia kerja naik sebanyak 110.420 orang atau naik 1,02%.

Grafik 3.1
Perbandingan Penyerapan Tenaga Kerja



Capaian indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2024 sebesar 93,75%, dari target yang ditetapkan terealisasi sebesar 95,13%, telah melebihi target yang ditetapkan.

Pencapaian indikator diatas melalui :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan Sub Kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.

Untuk Tahun 2024 kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Pelatihan membuat aneka macam roti/kue sebanyak 4 angkatan.

➤ Angkatan 1 dilaksanakan pada tanggal 2 Februari sampai dengan 7 Maret 2024, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.

➤ Angkatan 2 dilaksanakan pada tanggal 23 April sampai dengan 17 Mei 2024 sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.

➤ Angkatan ke 3 dilaksanakan pada tanggal 20 Mei sampai dengan 13 Juni 2024, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.

➤ Angkatan ke 4 dilaksanakan pada tanggal 20 Juni sampai dengan 2 Juli 2024, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.

b. Pelatihan menjahit pakaian dasar sebanyak 4 angkatan.

➤ Angkatan 1 mulai 12 Februari sampai dengan

- 7 Maret 2024, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.
- Angkatan 2 mulai pada tanggal 23 April sampai dengan 17 Mei 2024 sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.
 - Angkatan ke 3 dilaksanakan pada tanggal 20 Mei sampai dengan 13 Juni 2024, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.
 - Angkatan ke 4 dilaksanakan pada tanggal 20 Juni sampai dengan 2 Juli 2024, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.
- c. Pelatihan bed cover sebanyak 2 angkatan.
- Angkatan 1 mulai 9 Agustus sampai dengan 2 September 2024, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.
 - Angkatan 2 mulai pada tanggal 3 September sampai dengan 26 September 2024 sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.
- d. Pelatihan servis HP sebanyak 1 angkatan.
- Angkatan 1 mulai 30 Mei sampai dengan 20 Juni 2024, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.
- e. Pelatihan MUA sebanyak 2 angkatan.
- Angkatan 1 mulai 23 April sampai dengan 17 Mei 2024, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.
 - Angkatan 2 mulai 30 Mei sampai dengan 20 Juni 2024, sebanyak 16 orang, yang

bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.

- f. Pelatihan barbershop sebanyak 2 angkatan.
 - Angkatan 1 mulai 9 Agustus sampai dengan 2 September 2024, sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.
 - Angkatan 2 mulai pada tanggal 3 September sampai dengan 26 September 2024 sebanyak 16 orang, yang bertempat di UPTD BLK Kota Payakumbuh.

Pelatihan Membuat Aneka Macam Roti/Kue



Pelatihan Menjahit Pakaian Dasar



Pelatihan Bed Cover



Pelatihan Servis HP



Pelatihan MUA



Pelatihan Barbershop



2) Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas lembaga pelatihan kerja swasta di Kota Payakumbuh. Pembinaan ini dilakukan melalui dua metode utama

yaitu Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pembinaan ke Lapangan.

a. Bimbingan Teknis (Bimtek)

Bimtek diselenggarakan pada Hari Selasa-Rabu, 16-17 Juli 2024, bertempat di Hotel Mangkuto. Acara ini diikuti oleh 12 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang ada di Kota Payakumbuh. Dalam Bimtek ini, peserta diberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pelatihan kerja di lembaga masing-masing. Pembicara atau instruktur yang berkompeten memberikan materi terkait pengelolaan lembaga pelatihan, evaluasi, serta penerapan metode pelatihan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

b. Pembinaan ke Lapangan

Selain Bimtek, kegiatan pembinaan juga dilakukan dengan pembinaan ke lapangan, di mana tim pembina mengunjungi langsung lembaga pelatihan kerja untuk melakukan evaluasi dan memberikan masukan terkait pelaksanaan pelatihan yang sudah dijalankan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan industri dan bahwa proses pelatihan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan LPKS yang ada di Kota Payakumbuh dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas pelatihan kerja, sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja.

Bimtek LPKS Tanggal 16-17 Juli 2024



Pembinaan Kelapangan





2. Program Penempatan Tenaga Kerja pada Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

1) Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

Kegiatan ini bertujuan untuk membuka peluang baru dalam dunia kerja, baik melalui peningkatan keterampilan wirausaha maupun penyediaan informasi terkait peluang kerja di luar negeri. Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua bagian utama : Pelatihan Kewirausahaan dan Sosialisasi Peluang Kerja ke Luar Negeri.

a. Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli sampai dengan 26 Juli 2024 di Hotel Mangkuto, Kota Payakumbuh, dengan diikuti oleh 20 orang peserta. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan keterampilan praktis dan pengetahuan tentang bagaimana memulai dan mengelola usaha. Materi yang diberikan mencakup aspek-aspek penting dalam berwirausaha, seperti perencanaan bisnis, manajemen keuangan, strategi pemasaran, foto produk dan sukses story dari pelaku IKM. Di akhir pelatihan, peserta diharapkan mampu membuka usaha baru yang dapat berkontribusi pada perekonomian lokal.

b. Sosialisasi Peluang Kerja ke Luar Negeri

Selain pelatihan kewirausahaan, kegiatan lain yang dilaksanakan adalah Sosialisasi Peluang Kerja ke Luar Negeri, yang ditujukan untuk 250 orang siswa SMK di Kota Payakumbuh. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21-22 Agustus 2024 di Aula SMK 2 Payakumbuh. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai peluang kerja di luar negeri, termasuk proses perekrutan, persyaratan yang dibutuhkan, serta tantangan dan peluang yang ada. Para siswa SMK diberikan wawasan tentang berbagai jenis pekerjaan yang dapat diakses di luar negeri serta bagaimana mempersiapkan diri untuk bekerja di luar negeri.

Pelatihan Kewirausahaan



Sosialisasi Peluang Kerja ke Luar Negeri



2) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat pencari kerja dan meningkatkan kesempatan mereka dalam menemukan pekerjaan. Dua kegiatan utama yang dilakukan adalah pembuatan AK-1 bagi pencari kerja dan penyediaan informasi bursa kerja online.

a. Pembuatan AK-1 Bagi Pencari Kerja

Pembuatan AK-1 (Kartu Pencari Kerja) dilakukan di Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk memberikan kemudahan bagi pencari kerja yang ingin mendaftar dan mendapatkan akses ke berbagai peluang pekerjaan yang tersedia. Kartu AK-1 ini berfungsi sebagai identitas bagi pencari kerja yang tercatat dan dapat digunakan untuk melamar pekerjaan serta mengikuti program pelatihan yang disediakan oleh pemerintah maupun sektor swasta.

b. Informasi Bursa Kerja Online melalui Aplikasi SIAPkerja

Sebagai bagian dari upaya memperluas akses informasi ketenagakerjaan, Aplikasi SIAPkerja dari Kementerian Tenaga Kerja digunakan untuk memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan, pendidikan, pelatihan, dan berbagai hal terkait ketenagakerjaan. Melalui aplikasi ini, pencari kerja dan masyarakat usia kerja dapat mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan secara praktis dan cepat, kapan saja dan di mana saja.

c. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial

Selain aplikasi SIAPkerja, penyebarluasan informasi mengenai bursa kerja juga dilakukan melalui platform media sosial seperti Facebook

dan Instagram yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Dengan memanfaatkan media sosial, informasi terkait lowongan pekerjaan dan kesempatan pelatihan dapat dijangkau lebih luas oleh masyarakat.

Hingga bulan Desember 2024, tercatat 196 orang pencari kerja yang telah mengurus dan mendapatkan AK-1. Hal ini menunjukkan bahwa layanan ini memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dalam mempermudah proses pencarian kerja.

Pelayanan Pembuatan AK-1



Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial



a) Jumlah Pencari Kerja Menurut Pendidikan Di Kota Payakumbuh Tahun 2024

PENDIDIKAN	Tahun 2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD	1	-	1
SLTP	3	2	5
SLTA	83	70	153
DIPLOMA I	-	-	
DIPLOMA II	-	-	
DIPLOMA III	1	1	2
D IV/SARJANA S.I	14	20	34
PASCA-SARJANA / S.II	-	1	1
Jumlah	102	94	196

Sumber Data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Disnakerperin

b) Penempatan Tenaga Kerja Menurut Pendidikan Di Kota Payakumbuh Tahun 2024

PENDIDIKAN	Tahun 2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD	1	-	1
SLTP	1	2	3
SLTA	41	35	76
DIPLOMA I	-	-	-
DIPLOMA II	-	-	-
DIPLOMA III	-	1	-
D IV/SARJANA S.I	8	12	20
PASCA-SARJANA / S.II	-	-	-
Jumlah	51	50	101

Sumber Data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Disnakerperin

c) Tenaga Kerja yang telah disalurkan Tahun 2024

No.	Keterangan	Tahun 2024 (orang)
1.	Tenaga Kerja Indonesia ke LN	4
2.	Dalam Negeri (Swasta)	-
3.	Dalam Negeri Lainnya	97
4.	Magang ke Malaysia	-
5.	Magang ke Thailand	-
6.	Magang ke Jepang	-
	Jumlah	101

Sumber Data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Disnakerperin

3. Program Hubungan Industrial pada Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan pencegahan perselisihan HI sebanyak 7 perkara :

1. Toko Bunda
2. PT. Amanah Ibu (outsourcing)
3. PT. Kimia Farma
4. PT. Payakumbuh Sehati
5. PT. BRI Cbg Payakumbuh
6. PT. Shopee Expres
7. PT. Pinus Merah Abadi

Jenis perselisihan yang dicegah tersebut adalah perselisihan PHK dan perselisihan hak, dengan datangnya pekerja/pengusaha ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melakukan konsultasi permasalahan dan setelah diberikan advise dan masukan pekerja/pengusaha akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan di tingkat perusahaan.

- b. Kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan ketenagakerjaan dengan peserta 50 perusahaan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2024 dengan narasumber dari Kementrian ketenagakerjaan RI.

Sosialisasi Peraturan-Peraturan Ketenagakerjaan



- 2) Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelesaian kasus yang masuk sampai Desember 2024 adalah 3 kasus yaitu (PT. Pinus Merah Abadi, PT. Halleyora Power dan PT. PKSS) 2 kasus bisa diselesaikan dengan perjanjian bersama pada tahap perundingan bipartit (PT. Pinus Merah Abadi dan PT. Halleyora) sedangkan untuk kasus PT. PKSS tidak tercapai Perjanjian Bersama dan sampai laporan ini dibuat masih dalam proses mediasi.

Penyelesaian Perselisihan



Anggaran pendukung untuk indikator Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja sebesar Rp. 1.407.615.308,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.327.231.136,- atau sebesar 94,29%.

1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Perkembangan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Tahun 2022 - 2024 :

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja
Tahun 2022-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	93,55%	94,84%	93,75%	95,16%	93,75%	95,13%

- a. Capaian sasaran strategis pertama Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja mempunyai 1 (Satu) indikator kinerja, persentase penyerapan tenaga kerja pada Tahun 2022 realisasi sebesar 94,84% di Tahun 2023 naik sebesar 95,16% dan di Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 95,13%, hal ini di sebabkan penurunan peluang kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan faktor demografis atau social : misalnya, adanya peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang tidak dapat diserap dalam pasar kerja karena keterbatasan kesempatan kerja.

1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	% Capaian
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	95,13%	93,77%	101,45%

Tahun 2024 merupakan tahun ke 2 Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, indikator capaian kinerja adalah persentase penyerapan tenaga kerja sebesar 95,13%, yang

berarti melampaui target capaian akhir Renstra sebesar 93,77%, atau memiliki persentase capaian 101,45%.

1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Realisasi capaian Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian IKU Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target/Standar Nasional
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	95,13%	97,68%

Data Ketenagakerjaan Nasional Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024
Angkatan Kerja	152.107.603
Bekerja	144.642.004
Penganggur	7.465.599
Bukan Angkatan Kerja	63.263.565
Sekolah	15.774.285
Mengurus Rumah Tangga	39.270.891
Lainnya	8.218.389

Penduduk Usia Kerja	215.371.168
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,63%
Tingkat Penganggur (%)	4,91%

Sumber Data : BPS Indonesia Tahun 2025

Sasaran strategis 1 pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Tenaga Kerja realisasi capaian sebesar 95,13% sudah mencapai target nasional, yang target/standar nasional sebesar 97,68%.

1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja, disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya penyebarluasan informasi pasar kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui pasar kerja online, media sosial dinas (Facebook, Instagram) website dinas, aplikasi My Kopay dan manual;
2. Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja melalui kegiatan pelatihan dan pemagangan dan dukungan dari pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui program-program pelatihan berbasis kluster kompetensi yang dilaksanakan di BLK Payakumbuh yang pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 serta kerjasama dengan pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP);

3. Adanya kegiatan memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar propinsi/luar negeri;
4. Potensi untuk lapangan kerja sektor informal yang bisa diserap oleh UKM dan IKM di Kota Payakumbuh sangat besar;
5. Potensi pencari kerja sektor informal yang cukup besar.

Faktor Penghambat :

1. Terbatasnya ketersediaan lowongan pekerjaan sektor formal;
2. Masih adanya lowongan pekerjaan belum terisi karena pencari kerja tidak memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja;
4. Masih adanya pencari kerja yang belum memiliki keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan dunia kerja;
5. Keterbatasan permodalan untuk membuka usaha baru.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 1 Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana promosi lowongan kerja/pasar kerja yang lebih representatif dan Penambahan personil pejabat fungsional pengantar kerja;
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang banyak dibutuhkan oleh dunia kerja;
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan melakukan pelatihan peningkatan produktifitas dan up-skill bagi tenaga kerja;
4. Memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha baru melalui perbankan dan bantuan-bantuan lain melalui program Pemerintah Pusat.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	93,75%	141,79%	151,24%	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dalam meningkatkan kompetensi SDM pencari kerja - Kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) Padang, Medan, Semarang, Bandung, Serang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana promosi lowongan kerja/pasar kerja yang lebih representatif dan Penambahan personil pejabat fungsional pengantar kerja 2. Melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang banyak dibutuhkan oleh dunia kerja 3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan melakukan pelatihan peningkatan produktifitas dan up-skill bagi tenaga kerja 4. Memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha baru melalui perbankan dan bantuan-bantuan lain melalui program Pemerintah Pusat

Tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran strategis Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja mempunyai 1 indikator sasaran yaitu Persentase penyerapan tenaga kerja dengan tingkat capaian rata-rata lebih dari 100%.

Adapun evaluasi dan analisis menurut sasaran strategis dikarenakan program pemulihan ekonomi daerah, dimana salah satu kegiatan adalah dengan memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat/pencari kerja yang tidak mempunyai keahlian/keterampilan, anak yang menganggur/putus sekolah, anak yang kurang mampu serta masyarakat yang terdampak dari kenaikan harga BBM.

Komponen yang menunjang keberhasilan adalah selain dari sumber dana APBD sebanyak 271 orang dan ditambah adanya kerjasama dengan instansi terkait seperti :

- Pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja Payakumbuh dengan Anggaran dari Provinsi Sumatera barat sebanyak : 96 orang
 - Pelatihan service sepeda motor konvensional sebanyak 12 orang;
 - Pelatihan asisten pembuat pakaian sebanyak 21 orang
 - Pelatihan pembuatan roti dan kue sebanyak 16 orang
 - Pelatihan practical office advance sebanyak 16 orang
 - Pelatihan plate welder smaw 3g-up/pf sebanyak 2 orang
 - Pelatihan fillet welder smaw 3f/pf sebanyak 6 orang
 - Pelatihan Barista sebanyak 5 orang
 - Pelatihan teknisi telepon seluler perangkat keras sebanyak 3 orang
 - Pelatihan menjahit pakaian wanita dewasa sebanyak 15 orang
- Pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Industri Padang dengan Anggaran dari Provinsi Sumatera barat sebanyak : 104 orang
 - Pelatihan Barista sebanyak 54 orang
 - Pelatihan Sulam sebanyak 50 orang
- Pelatihan Peningkatan Produktifitas yang dilaksanakan oleh BPVP Medan dengan Anggaran dari APBN sebanyak 19 orang
- Pelatihan Elektronika yang dilaksanakan oleh LPK Multiflas dengan anggaran APBN sebanyak 35 orang
- Pelatihan Iht Food Handling foot Safety dilaksanakan oleh LPK ARA dengan anggaran APBN sebanyak 6 orang
- Pelatihan Komputer yang dilaksanakan oleh LPK AL Iffat dengan anggaran APBN sebanyak 8 orang
- Pelatihan Menjahit yang dilaksanakan oleh LPK Ida Teratai dengan Anggaran APBN sebanyak 3 orang

1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.8
 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya
 Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja				1.407.615.308	1.327.231.136	94,29%	5,71
	Persentase penyerapan tenaga kerja	93,75%	95,13%	101,47%				

a. Analisis efisiensi penggunaan anggaran

Merujuk pada implementasi sasaran kinerja, Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja pada Tahun 2024, maka dalam konteks efisiensi penggunaan sumber anggaran berada pada kategori Sangat Baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 5,71 dibandingkan besaran anggaran yang diplot. Dengan penggunaan anggaran yang tersedia mencapai 94,29%.

b. Analisis efisiensi sumber daya manusia

Kualifikasi jabatan struktural dan jabatan fungsional membidangi sasaran Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja dengan hasil tingkat capaian lebih dari 100% berarti dilaksanakan secara efektif akan tetapi menurut beban kerja yang menunjang kinerja sasaran ini masih kurang dari jumlah pegawai yang ada sebanyak 5 orang yang terdiri dari : 3 ASN dan 2 TJP.

1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Merujuk pada hasil inventarisasi indikator realisasi sasaran kinerja 1, dapat disimpulkan bahwa seluruh program/kegiatan menjadi bagian dari (menunjang) keberhasilan pencapaian kinerja.

Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai capaian $\leq 100\%$. Secara umum, capaian tersebut diperoleh karena adanya sinkronisasi program/kegiatan dengan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, sehingga output dan outcome program/kegiatan lebih terarah dan saling mendukung adalah :

Tabel 3.9
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Kurang
1	Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	141,79%				
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	153,42%	Menunjang
				Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	125%	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	142,86%	Menunjang
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	110,94%	Menunjang
				Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	110,94%	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penyebaran informasi kerja	125%	Menunjang
				Program Hubungan	Persentase Perusahaan yang	1.024,07%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Kurang
				Industrial	Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
				Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	133,33%	Menunjang

Sasaran 2

Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan Meningkatkan Sektor Strategis. Hal-hal yang mendorong sasaran ini berkaitan dengan peningkatan produksi industri pengolahan melalui :

1. Pembinaan dan pelatihan bagi IKM;
2. Pelatihan sarana produksi Teknologi Tepat Gunga (TTG) bagi IKM;
3. Fasilitasi kegiatan Dekranasda;
4. Fasilitasi dalam pengurusan sertifikasi halal;
5. Pendataan IKM
6. Monitoring dan evaluasi IKM.

Upaya ini dilakukan untuk membentuk IKM yang berkualitas dan mandiri. Melalui kegiatan ini diharapkan meningkatkan produksi dari industri IKM sehingga dapat meningkat pendapatan dan ekonomi.

Untuk mengukur tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

2.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria Kinerja
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,25%	6%	184,62%	Sangat Baik

Dengan rumus perhitungan :

$$= \frac{\text{Nilai Produksi Th 2024} - \text{Nilai Produksi Th 2023}}{\text{Nilai Produksi Th 2023}} \times 100\%$$

$$= \frac{301.636.853 - 284.598.221}{284.598.221} \times 100\%$$

$$= \mathbf{6\%}$$

Pada Sasaran 2 ini terdiri dari 1 Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 184,62% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini disebabkan dengan sudah berangsur pulihnya sektor-sektor ekonomi.

Capaian indikator Persentase Peningkatan Nilai Produksi Tahun 2024 mengalami kenaikan dari capaian tahun sebelumnya, yang mana pada Tahun 2023 sebesar 5,63% sedangkan Tahun 2024 sebesar 6%, melebihi dari target yang ditetapkan.

Pencapaian indikator diatas melalui :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan promosi dan pemasaran produk IKM Fashion dan Kerajinan Kota Payakumbuh dan

meningkatkan kapasitas IKM Pangan dan Sandang dan Kerajinan Kota Payakumbuh.

Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2024 yaitu :

a. Workshop Bambu

Workshop Kerajinan dari Bambu dilaksanakan pada tanggal 9 Juli s/d 12 Juli 2024 dengan peserta sebanyak 10 orang yang sebagian besar merupakan peserta workshop bambo tahun sebelumnya. Instruktur dalam workshop ini adalah Bapak Amrizal, S.Pd, MA dan Bapak Waryan, S.Sn, keduanya merupakan dosen Prodi Pendidikan Kria ISI Padang Panjang. Workshop kali ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya dan fokus pelatihan lebih dititikberatkan kepada kualitas finishing pekerjaan.

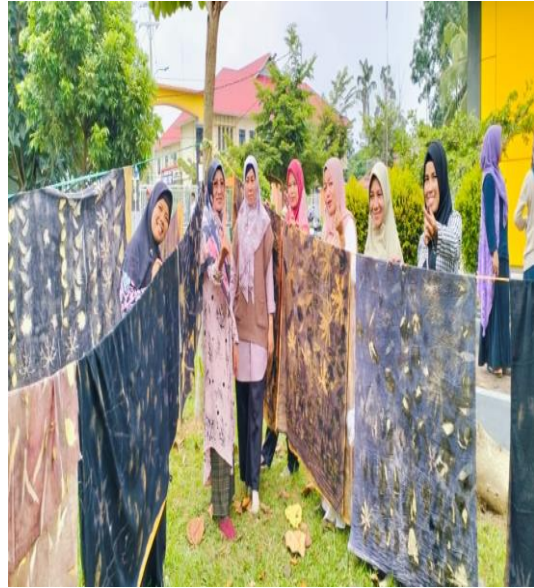
Workshop Bambu



b. Workshop Ecoprint

Workshop Ecoprint dilaksanakan pada tanggal 29 Juli s/d 2 Agustus 2024 di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Pelatihan ini diikuti oleh 15 orang peserta dengan instruktur Ibu Widdyanti dari Canting Buana Kreatif Padang Panjang.

Workshop Ecoprint



c. Pelatihan Memasak Rendang

Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 23 September s/d 27 September 2024 di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Pada hari pertama, peserta dibekali dengan pengetahuan terkait dengan keamanan pangan dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang disampaikan oleh narasumber dari Loka POM Payakumbuh. Sementara di sisa hari pelatihan, dilaksanakan praktek produksi di Sentra IKM Rendang Payakumbuh yang dipandu oleh Instruktur dari Universitas Negeri Padang. Peserta dibekali memasak berbagai varian masakan rendang, diantaranya : rendang daging, rendang suir, rendang bola-bola ikan, dan rendang telur dengan peserta pelatihan berjumlah 16 orang.

Pelatihan Memasak Rendang



d. Pelatihan Produksi Olahan Jamur

Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 23 September s/d 28 September 2024 di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Peserta pelatihan berjumlah 35 orang dan akan dibimbing oleh Instruktur dari Universitas Negeri Padang. Peserta dibekali memasak berbagai varian masakan olahan jamur, diantaranya : Bakso Jamur Tiram dan Daging tiruan dari Jamur, sate jamur tiram (bumbu pedas manis) dan sate jamur bumbu kuning, risoles jamur tiram, nugget jamur, jamur krispi, dan keripik jamur.

Pelatihan Produksi Olahan Jamur



e. Operasional Dekranasda Kota Payakumbuh

Sub kegiatan ini memberikan dukungan anggaran terhadap operasional Dekranasda Kota Payakumbuh seperti kebutuhan administrasi, penyelenggaraan rapat, menghadiri undangan rapat / pertemuan dari Dekranas RI, Dekranasda Provinsi Sumatera Barat, dan/atau pihak lain yang terkait dengan tugas Dekranasda Payakumbuh. Berikut kegiatan yang dilaksanakan dan/atau diikuti oleh Dekranasda Kota Payakumbuh selama Tahun 2024 :

No	Kegiatan	Penyelenggara	Jadwal	Keterangan
1	Rakor	Dekranasda Prov. Sumatera Barat	20 Februari 2024	Kantor Dekranasda Prov Sumbar
2	Inacraft I 2024	ASEPHI dan Mediatama	28 Februari s/d 3 Maret 2024	Pameran UMKM di JCC Jakarta
3	Bazaar Ramadhan	Dekranasda Prov. Sumbar	1 April s/d 4 April 2024	Halaman Parkir Gubernur Sumbar
4	Pelatihan ATBM	Disnakerperin dan Dekranasda Payakumbuh	14 Mei s/d 17 Mei dan 20 Mei s/d 22 Mei 2024	Sentra Tenun Balai Panjang Payakumbuh
5	HUT Dekranas Ke-44	Dekranas Pusat	14 s/d 18 Mei 2024	Surakarta
6	Pelantikan Ketua Dekranasda Payakumbuh	Dekranasda dan PKK Payakumbuh	7 Juni 2024	Pelantikan Pj. Ketua Dekranasda Kota Payakumbuh
7	Workshop Kerajinan dari Bambu	Disnakerperin dan Dekranasda Payakumbuh	9 Juli s/d 12 Juli 2024	Sultan Resort & Medan Nan Bapaneh, Ngala

No	Kegiatan	Penyelenggara	Jadwal	Keterangan
8	Payakumbuh Botuang Festival 2024	Disparpora dan Dekranasda Payakumbuh	11 Juli s/d 13 Juli 2024	Pameran UMKM, seni pertunjukan, festival budaya, Workshop bamboo
9	Workshop Ecoprint	Disnakerperin dan Dekranasda Payakumbuh	29 Juli s/d 2 Agustus 2024	Lokasi Pelatihan di Kantor Disnakerperin
10	Workshop Batik	Disnakerperin dan Dekranasda Payakumbuh	31 Juli s/d 3 Agustus 2024	Lokasi Pelatihan di Kantor Disnakerperin
11	Muffest 2024	Indonesian Fashion Chamber dan Gemalindo	8 Agustus s/d 11 Agustus 2024	Istora Senayan Jakarta
12	Pawai Alegoris	Dinas Pendidikan	17 Agustus 2024	Pusat Kota Payakumbuh
13	Pameran Kriyanusa & Rakernas	Dekranas Pusat	27 Agustus s/d 29 Agustus 2024	Hall B, Jakarta Convention Center, Jakarta
14	Payakumbuh Creative Festival 2024	Payakumbuh Creative dan PMC	31 Agustus s/d 1 Spetember 2024	Gor M. Yamin Payakumbuh
15	Pelatihan Rajut Angkatan I	Disnakerperin dan Dekranasda Payakumbuh	29 Agustus s/d 30 Agustus & 2 September s/d 4 September 2024	Lokasi Pelatihan di Kantor Disnakerperin
16	Sawahlunto International SongketSilungkang	Dekranasda Kota Sawahlunto	7 September 2024	Sawahlunto

No	Kegiatan	Penyelenggara	Jadwal	Keterangan
	Carnival (SISSCa) Tahun 2024			
17	Inacraft II	ASEPHI & Mediatama	2 Oktober s/d 6 Oktober 2024	Jakarta Convention Center, Jakarta
18	Pelatihan Rajut Angkatan II	Disnakerperin dan Dekranasda Payakumbuh	7 Oktober s/d 11 Oktober 2024	Lokasi Pelatihan di Rumah Rajut Fayari
19	JMFW	Kemendag, Kadin, IFC	9 Oktober s/d 12 Oktober 2024	ICE-BSD, Tangerang, Banten
20	Lomba Desain Busana Muslimah	Dekranasda Prov. Sumbar	16 Oktober 2024	Kantor Disperindag Prov. Sumbar
21	IN2MF	BI, Kementerian Koperasi UKM, dan IFC	30 Oktober s/d 3 Nopember 2024	Jakarta Convention Center, Jakarta
22	Spotlight 2024	Indonesian Fashion Chamber dan Gemalindo	12 Desember s/d 15 Desember 2024	Jakarta Convention Center, Jakarta
23	Payakumbuh Barolek Godang (Bagodang)	Pemko Payakumbuh	14 Desember s/d 17 Desember 2024	Seni Pertunjukan, pameran UMKM, fashion carnival, pasar rakyat
24	Payakumbuh Fashion Carnaval Tahun 2024	Disnakerperin dan Dekranasda Payakumbuh	14 Desember 2024	Kawasan Tugu Adipura
25	Rapat Pengurus	Dekranasda Kota Payakumbuh	2024	Dilaksanakan sesuai kebutuhan

No	Kegiatan	Penyelenggara	Jadwal	Keterangan
				disepanjang tahun

f. Event yang diikuti dan/atau dilaksanakan oleh Dekranasda Kota Payakumbuh Seperti Event Fashion Show, Lomba, dan Payakumbuh Fashion Carnaval Dalam rangka promosi produk industri fashion Kota Payakumbuh, Dekranasda Kota Payakumbuh ikut serta dalam pagelaran event fashion show dan pameran, diantaranya yaitu :

➤ Muslim Fashion Festival (Muffest) Tahun 2024

Event ini diselenggarakan oleh Indonesian Fashion Chamber (IFC) bekerjasama dengan Gemalindo pada tanggal 8 Agustus s/d 11 Agustus 2024 di Istora Senayan Jakarta. Dekranasda Kota Payakumbuh ikut ambil bagian dalam event ini yaitu untuk penampilan Fashion Show.

Untuk Fashion Show, Dekranasda Kota Payakumbuh bekerja sama dengan desainer lokal Payakumbuh Berry Mirsha Saleppy. Dekranasda Kota Payakumbuh menampilkan 8 pakaian show, dimana 4 stel pakaian dibiayai melalui APBD Kota Payakumbuh melalui Belanja Bahan Percontohan Event.

Penampilan Dekranasda Kota Payakumbuh x Berry Mirsha

Dalam Event Muffest Tahun 2024



➤ Payakumbuh Creative Festival

Event ini dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus s/d 1 September 2024 di Gor M. Yamin, Payakumbuh. Event ini diselenggarakan oleh Payakumbuh Creative dan Payakumbuh Makeup Artist yang mengangkat tema “United in Harmony”. Event ini mengangkat pesona wastra Batik Payakumbuh sebagai bahan wajib dalam desain busana para desainer.

Penampilan Dekranasda dan Beberapa Desainer Lokal Payakumbuh dalam Event Payakumbuh Creative Festival Tahun 2024



➤ Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW)

Hilman Samudera, salah satu desainer muda asal Kota Payakumbuh telah melalui beberapa kali tahapan kurasi untuk mengikuti event JMFW 2024 dan berhasil melaluinya sehingga berhak tampil di main event JMFW. IKM yang juga dibina oleh Bank Indonesia ini, mendapatkan bantuan kontribusi event dari Bank Indonesia, Namun, untuk busana yang akan ditampilkan harus menyiapkannya sendiri.

Event JMFW diselenggarakan oleh Kemendag, Kadin, dan IFC pada tanggal 9 s/d 12 Oktober 2024 di CE-BSD, Tangerang, Banten. Dalam event ini, selain Fashion Show, juga dilaksanakan pameran.

Penampilan Dekranasda Kota Payakumbuh x Hilman Samudera dalam Event JMFW 2024 di ICE-BSD Tangerang, Banten



➤ **Lomba Desain Busana Muslimah**

Event tahunan yang diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Sumatera Barat ini kembali digelar dengan konsep yang berbeda. Lomba Desain Busana Muslimah dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024 di Kantor Disperindag Prov. Sumbar.

Dekranasda Kota Payakumbuh ambil bagian dalam perlombaan antara Dekranasda Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dan mengundang desainer Listi Syar'i. Tema event yang diangkat adalah sulaman Minangkabau. Dalam perlombaan tersebut, Dekranasda Kota Payakumbuh memperoleh juara **Harapan I.**

Penampilan Listi Syar'I dalam Lomba Desain Busana Muslimah Tahun 2024



- Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) Tahun 2024

Mengangkat tema “Elevating Sustainable Modest Fashion to The Global Stage”, IN2MF Tahun 2024 digelar dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan diantaranya Pameran Dagang, Fashion Show, Kompetisi, Talk Show, dan Business Matching. Dekranasda Kota Payakumbuh bekerjasama dengan desainer Fomalhaut Zamel ikut serta dalam Pameran dan Fashion Show. IN2MF 2024 dilaksanakan oleh Bank Indonesia, Kemenkop UKM, dan IFC pada tanggal 30 Oktober s/d 3 November 2024 di Jakarta Convention Center.

Penampilan Dekranasda Kota Payakumbuh x Fomalhaut Zamel dalam Event IN2MF Tahun 2024 di JCC, Jakarta



- Spotlight Tahun 2024

Di penghujung tahun 2024, IFC bersama Gemalindo kembali menggelar Event Fashion Show Spotlight yang mengangkat tema “Cultural Fushion”. Dekranasda Kota Payakumbuh kembali memanfaatkan momen promosi produk Industri Sandang dan Fashion Kota Payakumbuh yaitu Tenun Balai Panjang dengan menggandeng 3 orang desainer lokal Payakumbuh yaitu Megi, D’Fitra Nats, dan Muthis Collection.

Tenun Balai Panjang dikombinasikan dengan Batik Payakumbuh menjadi balutan utama busana yang menampilkan kesan muslim urban yang ready to wear. Event ini dilaksanakan tanggal 12-15 Desember 2024 di Jakarta Convention Center dan Dekranasda Kota Payakumbuh mendapatkan jadwal tampil pada tanggal 12 Desember 2024 jam 18.00 WIB.

Penampilan Dekranasda Kota Payakumbuh x Megi, Muthis, dan D'Fitra Nats dalam Event Spotlight Tahun 2024 di JCC, Jakarta



- Payakumbuh Fashion Carnival Tahun 2024
Event tahunan yang diselenggarakan oleh Dekranasda Kota Payakumbuh ini kembali digelar pada Tahun 2024. Mengusung tema “Etnic Ethics” event ini menghadirkan perlombaan yang dibagi dalam dua kategori yaitu kategori OPD dan kategori umum. Peserta yang ambil bagian dalam kegiatan ini wajib menggunakan wastra Payakumbuh, Tenun Balai Panjang dan/atau Batik Payakumbuh.
Event ini dilaksanakan dalam rangka memasyarakatkan Tenun Balai Panjang dan memperkenalkan Batik Payakumbuh yang saat ini menjadi focus dalam pembinaan. Selain itu, event ini

sekaligus dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT Kota Payakumbuh.

PFC 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 pada malam hari. Ini merupakan hal baru sepanjang pelaksanaan PFC. Namun, ternyata mendapatkan antusiasme luar biasa dari Masyarakat Kota Payakumbuh khususnya penikmat fashion. PCF sukses menghibur masyarakat Kota Payakumbuh.

Payakumbuh Fashion Carnaval Tahun 2024



b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu workshop Produksi Industri melalui Teknologi Tepat Guna

Workshop dilaksanakan selama 3 hari dengan 10 Orang Peserta yang berasal dari IKM Logam Kota Payakumbuh kategori pemula. Pelatihan ini dipandu oleh instruktur Ike Kesuma Beni Anwar dari Payakumbuh Welders. Pelatihan ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta tentang produksi Mesin Pemecah Batu Es.

**Workshop Produksi Mesin dan/atau Peralatan Industri
Melalui Teknologi Tepat Guna Tahun 2024**



c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Kegiatan UPTD P3R Sentra Rendang

➤ Operasional Rutin

Operasional rutin di UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang ini berupa belanja isi ulang tabung pemadam kebakaran, belanja isi ulang Gas LPG, belanja bahan lainnya, belanja alat tulis, belanja bahan cetak, belanja benda pos, belanja alat listrik, belanja makan minum, belanja tenaga jasa perorangan dan belanja premi asuransi dilakukan pembayarannya setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi.

➤ Pemeliharaan sarana dan prasarana, mesin, peralatan, dan fasilitas pendukung

Di tahun 2024 selain pemeliharaan rutin dan tera ulang timbangan juga dilakukan perbaikan kerusakan pada beberapa mesin seperti mesin retort, kuili steam dan blender (mixer). Dalam proses perbaikan ini ditemukan beberapa kendala antara lain suku cadang peralatan dan mesin yang original sulit didapat dan harganya pun jauh lebih mahal dari produk sejenis yang ada dipasaran. Selain itu tenaga teknisi yang menguasai

mesin yang kita miliki tidak tersedia di Kota Payakumbuh sehingga harus mendatangkan teknisi dari perusahaan penyedia peralatan yang berkedudukan di Jakarta. Untuk itu diperlukan biaya transportasi dan akomodasi tenaga teknisi yang cukup besar. Diharapkan untuk tahun 2025 biaya transportasi dan akomodasi tersebut bisa diakomodir dalam DPA UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang, sehingga pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan mesin bisa lebih maksimal.



➤ **Belanja Modal Peralatan**

Ditahun 2024 ini UPTD P3R melakukan pengadaan peralatan kantor berupa 2 unit filling cabinet, 2 unit vacuum sealer dan 1 unit rak arsip. Pengadaan ini dilatar belakangi oleh kurang optimalnya kapasitas

vacuum sealer untuk proses produksi dan rak untuk kearsipan pada UPTD P3R



d. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

➤ Workshop Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh selaku instansi yang bertugas membina Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Payakumbuh sangat berkepentingan untuk meningkatkan kualitas SDM IKM khususnya IKM Tenun. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan Workshop Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM memproduksi kain tenun menggunakan ATBM.

Workshop ATBM dilaksanakan pada tanggal 14 Mei s/d 17 Mei dan 20 Mei s/d 22 Mei 2024 di Sentra Tenun Balai Panjang. Workshop ini diikuti oleh 10 orang peserta yang dipandu oleh dua orang instruktur yang merupakan penenun berpengalaman dari Kelompok Tenun Balai Panjang yaitu Bapak Efendi dan Ibu Mimi Hirawati.

Workshop Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)



➤ Workshop Batik

Dalam 3 tahun terakhir ini, Kota Payakumbuh sudah mulai melaksanakan pembinaan untuk pembangunan industri batik di Kota Payakumbuh melalui Pelatihan batik tulis ataupun batik cap. Di Tahun 2024, Pelatihan batik kembali dilaksanakan. Fokus dari pembinaan batik kali ini masih pada pelaku industri pemula. Hal ini dimaksudkan untuk menambah jumlah pelaku usaha yang serius menggeluti usaha di sektor industri ini pasca dilaksanakan pelatihan.

Workshop batik dilaksanakan pada 31 Juli s/d 3 Agustus 2024 di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Pelatihan diikuti oleh 15 orang peserta dan dipandu oleh dua orang instruktur yaitu Pemil Yardi yaitu seorang fashion desainer dan pelaku industri batik serta Saudara Yozi Indra, seorang praktisi industri batik dan berpengalaman sebagai instruktur.

Workshop Batik



➤ Pelatihan Rajut

Pelatihan rajut dilaksanakan dalam 2 angkatan. Pelatihan untuk angkatan 1 dilaksanakan pada 29 Agustus s/d 30 Agustus dan 2 September s/d 4 September 2024 di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Sementara itu, untuk angkatan 2 dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober s/d 11 Oktober 2024 di Rumah Rajut Fayari. Masing-masing angkatan diikuti oleh 10 orang dan dipandu oleh dua orang instruktur yang sudah berpengalaman baik sebagai praktisi industry rajut ataupun sebagai instruktur yaitu Latifah Maya Sari dan Nita Asneri.

Pelatihan ini merupakan kategori pemula. Instruktur mengajarkan pengenalan bahan dan peralatan kerja dan berbagai teknik rajut hingga peserta mampu memproduksi satuatau beberapa produk karya sendiri seperti tas, dll.

Pelatihan Rajut



➤ Pelatihan Bengkel

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berkepentingan untuk membangun dan mengembangkan sektor industri jasa industri reparasi kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda 2. Untuk itu, dilaksanakan pelatihan bengkel yang ditujukan untuk IKM pemula dan wirausahawan baru. Dalam melaksanakan pelatihan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Payakumbuh dalam hal penyediaan bahan praktek, tempat, dan instruktur pelatihan.

Pelatihan ini diikuti oleh 15 orang peserta dan dipandu oleh dua orang instruktur yaitu Bapak Syaiful Haq dari BLK Payakumbuh dan Dodi Delfis, seorang praktisi. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 18 November s/d 21 November 2024 bertempat di BLK Payakumbuh.

Pelatihan Bengkel



➤ Pengadaan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)

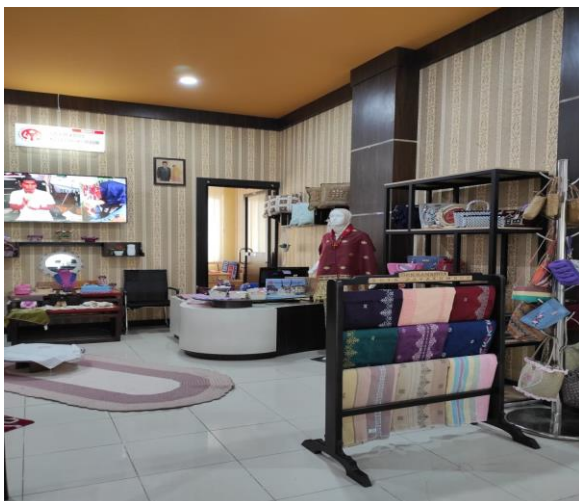
Dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi sentra tenun balai panjang yang dikelola oleh Kelompok Tenun Balai Panjang, maka dilaksanakan pengadaan

Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang merupakan peralatan produksi utama dalam membuat kain tenun. Pengadaan ATBM berjumlah 10 Unit dengan spesifikasi, berbahan baku kayu (mahoni/surian/setara), panjang 150 cm, Lebar 125 cm, Tinggi 150 cm, Kamran/gun sebanyak 4 buah, dan sisir ukuran 60. Pengadaan ini menggunakan metode e-purchasing melalui e catalog. Penyedia yang melaksanakan pekerjaan adalah Sukmana Songket yang berasal dari Kabupaten Agam.

Pengadaan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)



- Gallery Kriya Dekranasda di Mall Pelayanan Kota Payakumbuh



2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota pada Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS) RBA

Tujuan dari kegiatan ini antara lain:

- Meningkatkan standardisasi mutu produk IKM terutama sekali Sertifikasi Halal
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan IKM

Kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Pelatihan Pengelolaan Usaha Industri

Usaha masyarakat yang bergerak di sektor perindustrian memerlukan manajemen/pengelolaan yang baik meliputi tata kelola terhadap segala sumber daya yang ada seperti *Man* (SDM), *Money* (Keuangan), *Material* (Bahan Baku), *Machine* (Mesin dan Peralatan), dan *Method* (Metode Produksi). Manajemen Usaha dibutuhkan agar tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku usaha dapat tercapai dengan efisien dan efektif.

Aspek lain dalam manajemen/tata kelola usaha industri seperti aspek legal terkait perizinan dan standardisasi mutu produk juga harus menjadi perhatian IKM. Saat ini Perizinan Berusaha di Indonesia sudah terintegrasi dan berbasis resiko. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha Berbasis Resiko menjadi syarat wajib yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Begitu juga, dengan standardisasi mutu produk seperti PIRT, MD, Halal, SNI, ISO yang dibutuhkan sebagai jaminan kualitas produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada pasar.

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 23 Agustus Tahun 2024 di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kota Payakumbuh dengan menghadirkan Narasumber yang berkompeten di bidangnya yang berasal dari DPMPTSP dan Dinas Koperasi UKM Kota Payakumbuh, Politeknik ATI Padang, Disperindag Sumbar, dan BSPJI Padang. Pelatihan ini diikuti oleh 25 IKM dari berbagai jenis industri.

Pelatihan Pengelolaan Usaha Industri Tahun 2024



b. Fasilitasi Sertifikasi Halal

Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi IKM ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pengadaan Swakelola Tipe III, dimana Swakelola direncanakan dan diawasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh selaku Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola yang ditunjuk yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Sumatera Barat untuk Sertifikasi Halal Mekanisme Reguler dan Halal Center Cendekia Muslim untuk Mekanisme Self Declare.

Pada Tahun 2024 ini ada sebanyak 49 IKM/Kelompok Produk yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

dengan rincian 44 IKM/Kelompok Produk Sertifikasi Halal Mekanisme *Self Declare* dan 5 IKM/Kelompok Produk Mekanisme Reguler.

Sertifikat Halal Mekanisme Reguler

No	Nama IKM	Jenis Produk	No Sertifikat	Alamat
1	PT. Kampung Guci Artisan	Daging dan produk olahan daging	ID13110000430970822	Parak Batuang
2	Abon Umma	Daging dan produk olahan daging	ID13110020541540924	Ikua Koto Dibalai
3	Doa Mandeh	Daging dan produk olahan daging	ID13110020541510924	Payolansek
4	Ayam Sehat Herbal Probiotik	Daging dan produk olahan daging	ID13110020541530924	Padang Tinggi Piliang
5	Tungkumandeh	Daging dan produk olahan daging	ID13110020541490924	Balai Panjang

Sertifikat Halal Mekanisme Self Declare

No	Nama IKM	Jenis Produk	No Sertifikat	Alamat
1	Jelita Cake And Bakery	Produk bakeri	ID13110019481770724	Tigo Koto Diate
2	Aneka Kue Kering Edelweis	Produk bakeri	ID13110019481760724	Balai Kaliki
3	Nh	Produk bakeri	ID13110019383640724	Bulakan Balai Kandi
4	Dapoer Anun	Produk bakeri	ID13110019383600724	Balai Panjang
5	Karpah [Kerupuk Padeh]	Makanan ringan siap santap	ID13110019343980724	Kapalo Koto Dibala
6	Usaha Kue Dan	Produk bakeri	ID13110019329730724	Tigo Koto Di

No	Nama IKM	Jenis Produk	No Sertifikat	Alamat
	Roti Dua Putra			Baruah
7	Putra Tanjung	Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13110019320620724	Talang
8	Qasrin Cake	Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13110019318320724	Tigo Koto Dibaruah
9	Jajanan Ayu	Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-	ID13110018114680524	Padang Sikabu

No	Nama IKM	Jenis Produk	No Sertifikat	Alamat
		kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan		
10	Es Cendol Emping Dunsanak	Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13110018114690524	Padang Sikabu
11	Empat Saudara	Makanan ringan siap santap	ID13110018037750524	Tigo Koto Dibaruah
12	Usaha Kedele Tiga Saudara	Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13110018037010524	Kotokociak Kubutapakrajo

No	Nama IKM	Jenis Produk	No Sertifikat	Alamat
13	Gorengan Si Kembar	Minuman dengan pengolahan	ID13110018035670524	Tigo Koto Dibuah
14	Kerupuk Lado Ua Ia	Makanan ringan siap santap	ID13110018035540524	Ikua Koto Dibalai
15	Kuliner Sylvia	Minuman dengan pengolahan	ID13110018035540524	Parambahan
16	Usaha Ama Ita	Minuman dengan pengolahan	ID13110018033640524	Kotokociak Kubutapakrajo
17	Berkah Food	Makanan ringan siap santap	ID13110019344230724	Ibuah
18	Sanjai Gemilang	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13110018391540724	Tanjung Pauh
19	Kerupuk Kembar	Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13110018391530724	Ikua Koto Dibalai

No	Nama IKM	Jenis Produk	No Sertifikat	Alamat
20	Dapur Mom's Mg	Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein	ID13110018387430724	Subarang Batuang
21	Cemilan Mama Ai	Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13110018329600724	Nunang Daya Bangun
22	Laura	Makanan ringan siap santap	ID13110018329370724	Napar
23	Sakinah Food	Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13110018329390724	Pakan Sinayan

No	Nama IKM	Jenis Produk	No Sertifikat	Alamat
24	Bu Yelly	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13110018320610724	Padang Tinggi Piliang
25	Oase Kitchen	Produk bakeri	ID13110019564360924	Padangdata Tanahmati
26	Salfan Caps	Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13110019564340924	Koto Tangah
27	Tungku Mande	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13110019564320924	Balai Panjang
28	Imang Bachtiar	Makanan ringan siap santap	ID13110019564330924	Padang Tinggi Piliang
29	Piekumbuh By Dapoer Rindhana	Produk bakeri	ID13110019533600924	Ibuah
30	Barokah Snack	Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan	ID14110019533020924	Balai Gadang

No	Nama IKM	Jenis Produk	No Sertifikat	Alamat
		dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan		
31	Chocobit Brownis	Produk bakeri	ID13110019529170924	Payolansek
32	Zhafran Cake And Bakery	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13110019529090924	Padang Sikabu
33	Sanjai Aqila	Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein	ID13110019485650924	Tanjung Pauh
34	Cinta Garendong	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan	ID13110020526430924	Koto Panjang Payobasuang
35	Sarapan Pagi Ma Irda	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan	ID13110020684251024	Ikua Koto Dibalai
36	Jajanan Lim	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan	ID13110020538641024	Ikua Koto Dibalai

No	Nama IKM	Jenis Produk	No Sertifikat	Alamat
		bahan tambahan pangan		
37	Dapur Bu Dev	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13110020538621024	Kotokociak Kubutapakrajo
38	Dapur Ma Yas	Makanan ringan siap santap	ID13110020538581024	Napar
39	Kuliner Dewi	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13110020538561024	Kotokociak Kubutapakrajo
40	Dapur Ukhty	Produk bakeri	ID13110020538481024	Tigo Koto Diate
41	Empat Saudara	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13110020538421024	Tigo Koto Dibaruah
42	Pesona Latina	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13110020538391024	Sungai Durian
43	Alona	Makanan ringan	ID13110020537541024	Tigo Koto

No	Nama IKM	Jenis Produk	No Sertifikat	Alamat
		siap santap		Dibaruah
44	Usaha Rayhan	Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	ID13110020537121024	Kotokociak Kubutapakrajo

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

a. Persiapan administrasi

Dalam rangka Pendataan Industri Tahun 2024, dibentuk suatu Tim yang akan mengorganisir pelaksanaan pendataan melalui Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 500.9.1/18.2.234/WK-PYK/2024 tentang Pembentukan Tim Pendataan Industri Kota Payakumbuh. Selain itu, sebelum dilakukan pendataan, juga dilakukan pengurusan Rekomendasi Kegiatan Statistik dari BPS Kota Payakumbuh.

b. Sosialisasi petunjuk teknis pendataan

Dalam rangka pendataan Industri Kota Payakumbuh Tahun 2024, Tim Pengumpul Data berasal dari Masing-

Masing Kelurahan di Kota Payakumbuh. Sebelum Petugas Pengumpul Data Kelurahan mulai bertugas, diberikan pembekalan terlebih dahulu, melalui kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pendataan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024. Petugas pendata dalam bertugas dibekali dengan ATK dan Surat Tugas.

c. Pendataan lapangan

Petugas pendata kelurahan melakukan pendataan kepada IKM yang berada di wilayah kelurahannya masing-masing. Tahapan pertama adalah melakukan verifikasi terhadap IKM yang masuk dalam data industri eksisting. Setelah itu, Mendata IKM baru yang ada di wilayah masing-masing yang belum masuk di dalam data eksisting. Tahapan ketiga, Menyandingkan data sementara dengan data NIB Sektor Industri dari DPMPTSP dan Tim Pendata melakukan *cross check* ke lapangan, hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya IKM yang luput dari pengamatan pendata.

Dari pendataan yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Perusahaan Industri : 2.500, dengan rincian sebagai berikut (Klasifikasi Usaha Mengacu kepada PP No. 7 Tahun 2021):
 - Klasifikasi Industri Mikro : 2483
 - Klasifikasi Industri Kecil : 17
 - Klasifikasi Industri Menengah : 0
2. Jumlah Tenaga Kerja : 7563
3. Nilai Investasi : Rp. 100.687.145.000,-
4. Nilai Produksi : Rp. 301.636.853.935,-

Anggaran pendukung untuk indikator Persentase Peningkatan Nilai Produksi sebesar Rp. 1.806.269.606,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.716.223.162,- atau sebesar 95,01%.

2.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Perkembangan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Tahun 2022 - 2024 :

Tabel 3.11
Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja
Tahun 2022-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,00%	3,1%	3,00%	5,63%	3,25%	6%

Capaian sasaran strategis kedua Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan mempunyai 1 (Satu) indikator kinerja, persentase peningkatan nilai produksi Tahun 2024 mengalami kenaikan di tahun sebelumnya, tetapi nilai produksi industri di Kota Payakumbuh melebihi target yaitu 6%.

Hal ini disebabkan, perkembangan Industri Kota Payakumbuh Tahun 2019 s/d 2024 cenderung stabil dan relatif mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan jumlah unit usaha sektor industri dan tenaga kerja. Sementara itu, dari sisi Nilai Investasi dan Nilai Produksi juga relatif mengalami peningkatan. Pada Tahun 2024, dilakukan pendataan industri 2024 yang melibatkan tenaga pendata dari masing-masing Kelurahan di Kota Payakumbuh, sehingga terdapat koreksi dari jumlah unit usaha IKM yang ada di Kota Payakumbuh dan jumlah tenaga kerja. Ditemukan industri yang lama sudah tidak aktif melakukan kegiatan, data ganda, pindah domisili, dan KBLI yang tidak sesuai sehingga harus dikeluarkan dari database. Akan tetapi, juga ada IKM baru yang datang dan memberikan kontribusi produktivitas yang lebih baik. Produktivitas industri yang masih stabil dan ada sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya kendati ada penurunan dari sisi jumlah IKM ditopang oleh inflasi kota payakumbuh yang stabil dan bahkan lebih rendah di

bawah angka inflasi nasional sebesar 2,51% dan penggunaan teknologi yang tepat dalam mendukung aktivitas produksi.

2.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.12
Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	% Capaian
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	6%	3,35%	179,10%

Tahun 2024 merupakan tahun ke 2 implementasi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, indikator capaian kinerja adalah Persentase Peningkatan Nilai Produksi sebesar 6%, yang berarti melampaui target capaian akhir Renstra sebesar 3,35%, atau memiliki persentase capaian 179,10%.

2.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Realisasi capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dibandingkan dengan standar nasional dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian IKU Sasaran Strategis 2 Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target/Standar Nasional
2	Meningkatnya	Persentase	6%	5,04%

	Produksi Industri Pengolahan	Peningkatan Nilai Produksi		
--	------------------------------	----------------------------	--	--

Sasaran strategis 2 pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Nilai Produksi realisasi capaian sebesar 6% sudah mencapai target nasional, yang target/standar nasional sebesar 5,04%.

2.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri, disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Ketersediaan Anggaran Pemerintah (APBD Kota Payakumbuh, APBD Propinsi, dan APBN);
2. Kondisi ekonomi yang sudah normal;
3. Distribusi bahan baku dan pengiriman produk yang lebih lancar;
4. Meningkatnya kunjungan wisatawan;
5. Ketersediaan bahan baku yang mencukupi;
6. Partisipasi aktif Kementerian/Lembaga/Instansi memfasilitasi IKM dalam melakukan pengurusan sertifikasi mutu produk;
7. Ketersediaan dukungan teknologi tepat guna;
8. Peluang pasar produk industri yang sudah mulai terbuka baik pasar domestik maupun internasional;
9. Meningkatnya pemanfaatan e-commerce oleh pelaku IKM;
10. Mulai tumbuhnya wirausahawan baru.

Faktor Penghambat :

1. Kenaikan harga BBM Bersubsidi dan Inflasi;
2. Kualitas SDM Pelaku IKM yang umumnya masih rendah;
3. Belum optimalnya sinergisitas antar Perangkat Daerah;

4. Belum optimalnya penerapan SOP dalam pelaksanaan produksi yang mengacu kepada prinsip prinsip produksi yang baik oleh IKM;
5. Masih rendahnya kesadaran pelaku IKM akan pentingnya sertifikasi mutu produk;
6. Anggaran yang tersedia belum optimal dalam mendukung peningkatan kapasitas IKM dan Kualitas produk yang dihasilkan;
7. Ketersediaan jumlah tenaga ahli dan tenaga fungsional Pembina IKM yang masih kurang;
8. Belum optimalnya IKM dalam memanfaatkan peluang pasar yang tersedia;
9. Masih minimnya inovasi dan kreatifitas IKM dalam pengembangan produk;
10. Belum optimalnya pengelolaan Sentra-Sentra IKM yang ada;
11. Masih minimnya kolaborasi antar IKM, IKM dengan Industri Besar, dan IKM dengan stakeholder terkait.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 2 Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Stabilitas ekonomi dan angka inflasi;
2. Implementasi program dan kegiatan yang berkesinambungan;
3. Meningkatkan komitmen dan kerjasama lintas sektor;
4. Ketersediaan anggaran yang memadai;
5. Meningkatkan ketersediaan bahan baku;
6. Meningkatkan pembinaan terhadap IKM secara komprehensif;
7. Meningkatkan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) oleh IKM;
8. Menghubungkan IKM dengan Industri Besar dan sektor ekonomi lainnya;
9. Meningkatkan pemasaran produk IKM melalui optimalisasi pemasaran online, optimalisasi strategi promosi, optimalisasi pembangunan jejaring dengan stakeholder terkait baik di dalam maupun luar negeri;
10. Optimalisasi pengelolaan sentra-sentra IKM.

Tabel 3.14
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,25%	6%	184,62%	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan peningkatan nilai produksi pelaku usaha/IKM melalui TTG dan diservikasi produk - Memfasiliatsi dalam pengurusan sertifikat halal bagi IKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilitas ekonomi dan angka inflasi 2. Implementasi program dan kegiatan yang berkesinambungan 3. Meningkatkan komitmen dan kerjasama lintas sektor 4. Ketersediaan anggaran yang memadai 5. Meningkatkan pembinaan terhadap IKM secara komprehensif 6. Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) oleh IKM 7. Menghubungkan IKM dengan Industri Besar dan sektor ekonomi lainnya 8. Meningkatkan pemasaran produk IKM melalui optimalisasi pemasaran online, optimalisasi strategi promosi, optimalisasi pembangunan jejaring dengan stakeholder terkait baik di dalam maupun luar negeri 9. Optimalisasi pengelolaan sentra-sentra IKM

Tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran strategis Meningkatkan Produksi Industri Pengolahan mempunyai 1 indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan nilai produksi dengan tingkat capaian rata-rata lebih dari 100%.

Adapun evaluasi dan analisis menurut sasaran strategis dikarenakan program pemulihan ekonomi daerah, dimana salah satu kegiatan adalah dengan memberikan pelatihan bagi IKM terkait dalam perkembangan teknologi tepat guna, diversifikasi produk TTG yang bertujuan menjadikan IKM sebagai target konsumen dalam persaingan pasar dan meningkatkan peran IKM dalam menunjang produktifitas IKM Kota Payakumbuh.

2.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.15
Analisis atas Efisiensi Sumber Daya
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan				1.806.269.606	1.716.223.162	95,01%	4,99
	Persentase peningkatan nilai produksi	3,25%	6%	184,62%				

a. Analisis efisiensi penggunaan anggaran

Merujuk pada implementasi sasaran kinerja, Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan pada Tahun 2024, maka dalam konteks efisiensi penggunaan sumber anggaran berada pada kategori Sangat Baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 4,99% dibandingkan besaran anggaran yang diplot. Dengan penggunaan anggaran yang tersedia mencapai 95,01%.

b. Analisis efisiensi sumber daya manusia

Kualifikasi jabatan struktural dan jabatan fungsional membidangi sasaran Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan dengan hasil tingkat capaian lebih dari 100% berarti dilaksanakan secara efektif akan tetapi menurut beban kerja

yang menunjang kinerja sasaran ini masih kurang dari jumlah pegawai yang ada sebanyak 26 orang yang terdiri dari : 5 ASN, 5 P3K dan 16 TJP.

2.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Merujuk pada hasil inventarisasi indikator realisasi sasaran kinerja 2, dapat disimpulkan bahwa seluruh program/kegiatan menjadi bagian dari (menunjang) keberhasilan pencapaian kinerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai capaian $\leq 100\%$. Secara umum, capaian tersebut diperoleh karena adanya sinkronisasi program/kegiatan dengan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, sehingga output dan outcome program/kegiatan lebih terarah dan saling mendukung adalah :

Tabel 3.16
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Kurang
1	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase peningkatan nilai produksi	6%				
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	4,070%	Menunjang
					- Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata	200%	
				Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100%	Menunjang
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk	480%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Kurang
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku industri yang difasilitasi	816,67%	Menunjang
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Data Perusahaan IKM yang Masuk Ke Dalam SIINas	8.500%	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Informasi Daerah	100%	Menunjang

Adapun perkembangan usaha industri di Kota Payakumbuh Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.17
Data Perkembangan Usaha Industri Kota Payakumbuh
Tahun 2019-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Unit Usaha	Unit	1,853	1,902	1,928	2,000	2,454	2,500
2	Formal	Unit	583	630	643	905	1,359	1.400
3	Non Formal	Unit	1,270	1,272	1,285	1,095	1,095	1.100
4	Tenaga Kerja	Orang	6,106	6,271	6,308	6,485	7,549	7.563
5	Nilai Investasi (ribu)	Rp.	88,040,791	95,649,716	95,954,716	87,291,446	94,866,073	100.687.145
6	Nilai Produksi (ribu)	Rp.	342,785,800	257,089,350	296,463,459	269,426,788	284,598,221	301.636.853

Sumber Data : Disnakerperin (Pendataan IKM Tahun 2024)

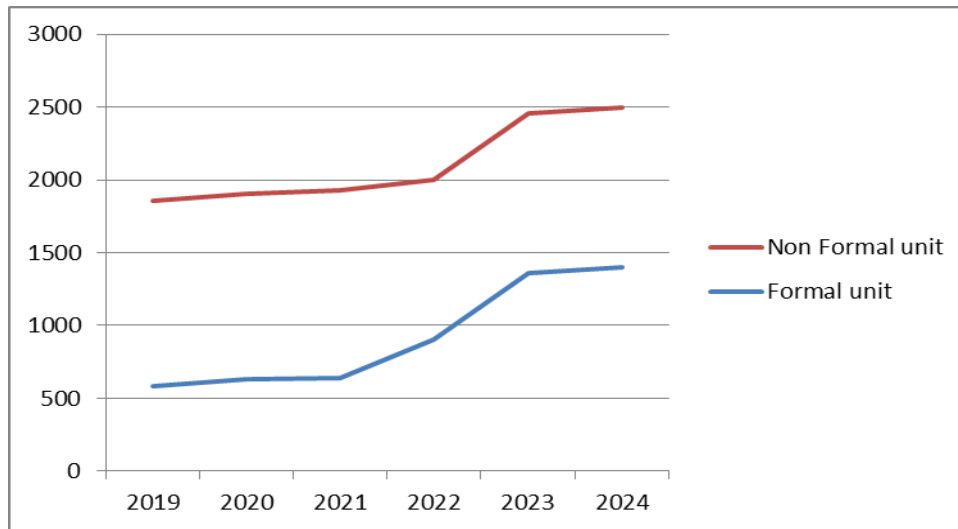
Perkembangan Industri Kota Payakumbuh Tahun 2019 s/d 2024 cenderung stabil dan relatif mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan jumlah unit usaha sektor industri dan tenaga kerja. Sementara itu, dari sisi Nilai Investasi dan Nilai Produksi juga relatif mengalami peningkatan. Pada Tahun 2024, dilakukan pendataan industri 2024 yang melibatkan tenaga pendata dari masing-masing Kelurahan di Kota Payakumbuh, sehingga terdapat koreksi dari jumlah unit usaha IKM yang ada di Kota Payakumbuh dan jumlah tenaga kerja. Ditemukan industri yang lama sudah tidak aktif melakukan kegiatan, data ganda, pindah domisili, dan KBLI yang tidak sesuai sehingga harus dikeluarkan dari database. Akan tetapi, juga ada IKM baru yang datang dan memberikan kontribusi produktivitas yang lebih baik. Produktivitas industri yang masih stabil dan ada sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya kendati ada penurunan dari sisi jumlah IKM ditopang oleh inflasi kota payakumbuh yang stabil dan bahkan lebih rendah di bawah angka inflasi nasional sebesar 2,51% dan penggunaan teknologi yang tepat dalam mendukung aktivitas produksi.

Tabel 3.18
Jumlah Usaha Industri Berdasarkan Klasifikasi Usaha

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Formal	unit	583	630	643	905	1,359	1,400
2	Non Formal	unit	1,270	1,272	1,285	1,095	1,095	1.100

Sumber Data : Disnakerperin (Pendataan IKM Tahun 2024)

Grafik 3.2
Jumlah Usaha Industri Berdasarkan Klasifikasi Usaha



Sektor industri bagi suatu daerah merupakan sektor yang menimbulkan perkembangan jauh lebih pesat untuk pertumbuhan ekonomi. Analisis teoritis dan penyelidikan empiris telah membuktikan bahwa kemajuan teknologi merupakan penentu utama dari lajunya pertumbuhan ekonomi. Tanpa sektor industri, daerah yang mulai berkembang akan mengalami pertumbuhan lebih lambat dari pada yang telah dicapainya pada tahun-tahun lalu. Oleh karena itu, sektor industri menjadi tumpuan harapan bagi pembangunan suatu daerah.

Kota Payakumbuh memiliki 2.500 unit Industri Kecil dan Menengah yang terdiri dari berbagai macam jenis Industri. Seperti industri kerajinan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bangunan, industri logam mesin dan elektronika dan industri pangan. Dimana industri yang paling banyak di Kota Payakumbuh yaitu Industri makanan seperti industri Rendang, gelamai, keripik sanjai, dan sebagainya.

Kota Payakumbuh merupakan kota penghubung antara Kota Padang dengan Kota Pekanbaru, dari Kota Payakumbuh dapat juga terhubung ke jalur lintas tengah Sumatera tanpa mesti melewati Kota Bukittinggi. Dan juga merupakan sebagai Kota persinggahan.

Sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Untuk mengukur tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.19
 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria Kinerja
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A	A	100%	Sangat Baik

Pada Sasaran 3 ini terdiri dari 1 Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik.

Didukung melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi 100%.

Anggaran pendukung untuk indikator Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat sebesar Rp. 3.429.976.208,- dan teralisasi sebesar Rp. 2.915.919.783,- atau sebesar 85,01%.

3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Perkembangan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2022 - 2024 :

Tabel 3.20
Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A

Capaian sasaran strategis ketiga Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai 1 (Satu) indikator kinerja, Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat Tahun 2024 mendapat nilai A.

3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.21
Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	% Capaian
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A	A	100%

Tahun 2024 merupakan tahun ke 2 implementasi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, indikator capaian kinerja adalah Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat dengan nilai A, yang berarti target capaian akhir Renstra dengan nilai A tercapai, atau memiliki persentase capaian 100%.

3.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun Ini dengan Standar Nasional

Realisasi capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dibandingkan standar nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian IKU Sasaran Strategis 3 Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target/Standar Nasional
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A	B

Sasaran strategis 3 pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat realisasi capaian dengan nilai A sudah mencapai target nasional, yang target/standar nasional nilai B.

3.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.23
Analisis atas Efisiensi Sumber Daya
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian				3.429.976.208	2.915.919.783	85,01%	14,99
	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A	A	100%				

a. Analisis efisiensi penggunaan anggaran

Merujuk pada implementasi sasaran kinerja, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada Tahun 2024, maka dalam konteks efisiensi penggunaan sumber anggaran berada pada kategori Baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 14,99% dibandingkan besaran anggaran yang diplot. Dengan penggunaan anggaran yang tersedia mencapai 85,01%.

b. Analisis efisiensi sumber daya manusia

Kualifikasi jabatan struktural dan jabatan fungsional membidangi sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan hasil tingkat capaian dari 100% berarti dilaksanakan secara efektif akan tetapi menurut beban kerja yang menunjang kinerja sasaran ini masih kurang dari jumlah pegawai yang ada sebanyak 14 orang yang terdiri dari : 8 ASN, 2 P3K dan 4 TJP.

3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Merujuk pada hasil inventarisasi indikator realisasi sasaran kinerja 3, dapat disimpulkan bahwa seluruh program/kegiatan menjadi bagian dari (menunjang) keberhasilan pencapaian kinerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai capaian $\leq 100\%$. Secara umum, capaian tersebut diperoleh karena adanya sinkronisasi program/kegiatan, sehingga output dan outcome program/kegiatan lebih terarah dan saling mendukung adalah :

Tabel 3.24
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Kurang
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	100				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	96,98%	Menunjang
					Nilai Evaluasi AKIP Disnakerperin oleh Inspektorat	100%	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	115,39%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	112,13%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap	100%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor	125%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Kurang
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang Memakai Barang Milik Daerah	100%	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa/Sarana Penunjang Operasional Kantor	125%	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dan Sarana Prasarana Kantor yang Dibayarkan	125%	Menunjang

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja ini, dengan nilai A, dengan mengoptimalkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan sumber pendanaan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Kalau kita lihat dari segi dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), bila dilihat dari segi kuantitas masih kurang mendukung dalam pencapaian target Sasaran Strategis ini, oleh karena itu kami terus berupaya memaksimalkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas/mutu SDM, selanjutnya dari segi kuantitas maupun kualitas dukungan SDM. Untuk itu kita juga berupaya dengan melakukan koordinasi dengan bidang terkait dalam hal ini Sekretariat yang ada dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, agar menambahkan jumlah personil untuk mendukung pencapaian sasaran ini.

3.2 Realisasi Anggaran

Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh alokasi anggaran APBD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

sebesar Rp. 6.643.861.122,- terealisasi sebesar Rp. 5.959.374.081,- atau 89,70%.

Pagu anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Payakumbuh. Gambaran Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan Kinerja Organisasi sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.25
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Pagu	Realisasi	%
1u	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	1.240.592.100	1.170.045.165	94,31
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	1.211.831.900	1.142.759.555	94,30
		Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.211.831.900	1.142.759.555	94,30
		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	28.760.200	27.285.610	94,87
		Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	28.760.200	27.285.610	94,87
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	139.284.458	131.821.968	94,64
		Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	78.472.700	73.578.095	93,76
		Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	78.472.700	73.578.095	93,76
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	60.811.758	58.243.873	95,78
		Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	60.811.758	58.243.873	95,78
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	27.738.750	25.364.003	91,44
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	27.738.750	25.364.003	91,44
		Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.537.850	21.790.358	92,58

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Pagu	Realisasi	%
		Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.200.900	3.573.645	85,07
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.665.673.356	1.589.019.082	95,40
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.665.673.356	1.589.019.082	95,40
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	649.650.792	631.978.238	97,28
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	35.160.200	33.595.815	95,55
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	528.518.606	498.000.023	94,23
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	452.343.758	425.445.006	94,05
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	61.899.300	58.611.695	94,69
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	61.899.300	58.611.695	94,69
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	61.899.300	58.611.695	94,69
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	78.696.950	68.592.385	87,16
		Kegiatan Penyediaan Informasi Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IUKI DAN IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	78.696.950	68.592.385	87,16

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Pagu	Realisasi	%
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	78.696.950	68.592.385	87,16
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.429.976.208	2.915.919.783	85,01
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.908.450	82.001.100	95,45
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.266.200	16.926.500	87,86
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.642.250	65.074.600	97,65
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.570.773.363	2.092.176.836	81,38
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.455.472.713	1.977.072.836	80,52
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	115.300.650	115.104.000	99,83
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.920.000	7.800.000	98,48
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.920.000	7.800.000	98,48
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.238.950	262.128.550	96,64
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.988.350	1.722.600	86,63
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.000.000	21.150.000	91,96
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.846.100	20.702.500	86,82
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.389.700	16.479.280	84,99
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.016.800	5.640.000	93,74
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.530.000	2.003.925	79,21
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.468.000	194.430.245	99,98

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Pagu	Realisasi	%
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjanh Urusana Pemerintahan Daerah	98.842.500	98.100.000	99,25
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.842.500	98.100.000	99,25
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.012.945	261.391.373	93,35
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.681.200	150.461.080	89,20
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.331.745	110.930.293	99,64
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.280.000	112.321.924	97,43
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	38.904.864	99,27
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.350.000	63.977.060	96,42
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.740.000	9.440.000	96,92

Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh terdiri dari 7 Program, 15 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dan dibagi menjadi 2 urusan yaitu :

1. **Urusan Wajib Tenaga Kerja**

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada Urusan Wajib Tenaga Kerja terdapat 4 Program, 12 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan. Dari 5 Program tersebut, 1 Program Sekretariat dan 4 Program Bidang Tenaga Kerja.

Sedangkan dari 24 Sub Kegiatan pada Urusan Wajib Tenaga Kerja, terdiri dari 18 Sub Kegiatan Sekretariat dan 6 Sub Kegiatan Bidang Tenaga Kerja.

Pagu anggaran tersebut sumber dananya dari APBD Kota Payakumbuh. Dukungan dana untuk Urusan Wajib Tenaga Kerja sebesar Rp. 4.837.591.516,- sedangkan realisasi anggaran untuk Urusan Wajib Tenaga Kerja sebesar Rp. 4.243.150.919,- atau 87,71%.

Dari 24 Sub Kegiatan tersebut 16 Sub Kegiatan yang penyerapannya diatas 90% dan 8 Sub Kegiatan yang penyerapannya diatas 80%.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dari Urusan Wajib Tenaga Kerja bila dilihat dari rata-rata penyerapan per kegiatan termasuk dalam kategori Baik.

2. Urusan Pilihan Perindustrian

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada Urusan Pilihan Perindustrian terdapat 3 Program, 3 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.806.269.606,-. Pagu anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Payakumbuh. Realisasi anggaran untuk Urusan Pilihan Perindustrian sebesar Rp.1.716.223.162,- atau 95,01%.

Dari 6 Sub Kegiatan tersebut diatas, 5 Sub Kegiatan yang penyerapannya diatas 90%, 1 Sub Kegiatan yang penyerapannya diatas 80%.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dari Urusan Pilihan Perindustrian bila dilihat dari rata-rata penyerapan per kegiatan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Tabel 3.26
Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,95%	6,06%	153,42%
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80%	100%	125%
		Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat	240 orang	240 orang	100%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
		dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			
		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	70%	100%	142,86%
		Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	12 lembaga	12 lembaga	100%
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	46,45%	51,53%	101,94%
		Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	46,45	51,53%	101,94%
		Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	370 org	370 org	100%
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	80 %	100%	125%
		Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	150 orang	196 orang	130,67%
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	4,03%	41,27%	1.024.07 %
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	75%	100%	133,33%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
		dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				
		Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7 perkara	7 perkara	100%
		Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	3 perkara	3 perkara	100%
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	- Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	0,10%	4,07%	4.070%
			- Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata	20%	40%	200%
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,67%	66,67%	100%
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	100%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
			Sumber Daya Industri			
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100%
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk	2,50%	12%	480%
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Industri Yang Difasilitasi	6 IKM	49 IKM	816,67%
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS	1 dokumen	1 dokumen	100%
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Data Perusahaan IKM yang Masuk Ke Dalam SIINas	1 perusahaan	85 perusahaan	8,500%
		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk	Persentase Penyediaan	66,67%	66,67%	100%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
		Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Informasi Daerah			
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	91	88,25	96,98%
			Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	A	100%
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	80%	92,31%	115,39%
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 laporan	12 laporan	100%
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	80%	89,70%	112,13%
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 orang	18 orang	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap	100%	100%	100%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	12 paket	12 paket	100%
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional Kantor	80%	100%	125%
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	6 paket	6 paket	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	8 paket	8 paket	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60 paket	60 paket	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 paket	9 paket	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2 laporan	2 laporan	100%
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 laporan	30 laporan	100%
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memakai barang milik daerah	100%	100%	100%
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	11 unit	11 unit	100%
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa/Sarana Penunjang Operasional Kantor	80%	100%	125%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah laporan penyediaan jasa	2 laporan	2 laporan	100%


No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
		Daya Air dan Listrik	komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dan Sarana Prasarana Kantor Yang Dibayarkan	80%	100%	125%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	12 unit	100%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14 unit	14 unit	100%

1. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada Urusan Wajib Tenaga Kerja terdapat 4 Program, 12 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan. Anggaran dari program dan kegiatan tersebut sumber dananya berasal dari APBD Kota Payakumbuh.

Dari 24 Sub Kegiatan tersebut diatas semua Sub Kegiatan yang realisasi kinerjanya diatas 80%. Adapun Program yang ada pada Bidang Tenaga Kerja ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan Indikator Kinerja Program :

 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Indikator program ini menargetkan untuk persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi sebesar 3,95%, realisasi sebesar 6,06%, dengan nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 153,42%.

- b. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan Indikator Kinerja Program :

✚ Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator program ini menargetkan untuk persentase tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota, sebesar 46,45%, terealisasi sebesar 51,53%, maka nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 110,94%, tidak tercapainya target dikarenakan, pada Tahun 2024, persentase tenaga kerja yang ditempatkan baik di dalam maupun luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota di Kota Payakumbuh tercatat sebesar 51,53%. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 51,53% dari tenaga kerja yang terdaftar berhasil ditempatkan melalui layanan yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Mekanisme layanan antar kerja ini mencakup penempatan tenaga kerja di berbagai sektor, baik di tingkat lokal maupun ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan yang dimiliki.

- c. Program Hubungan Industrial dengan Indikator Kinerja Program :

✚ Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Indikator program ini menargetkan persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) sebesar 4,03%, terealisasi sebesar 41,27%, maka nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 1.024,07%, hal ini disebabkan kasus yang masuk 3 kasus.

2. Urusan Pilihan Perindustrian

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada Urusan Pilihan Perindustrian terdapat 3 Program, 3 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan. Anggaran dari program dan kegiatan tersebut sumber dananya berasal dari APBD Kota Payakumbuh.

Dari 6 Sub Kegiatan tersebut 6 Sub Kegiatan yang realisasi kinerjanya diatas 90%.

Adapun Program yang ada pada Bidang Tenaga kerja ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Indikator Kinerja Program :

✚ Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna

✚ Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata

Indikator program ini menargetkan untuk persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna sebesar 0,10% dengan realisasi sebesar 4,07% dengan nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 4,070%. Sedangkan untuk persentase sentra/klaster industri yang tertata sebesar 20% dengan realisasi sebesar 40%, maka nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 200%.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Program :

✚ Persentase Industri yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk

Indikator program ini menargetkan untuk persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu produk sebesar 2,50%, dengan realisasi sebesar 12%, maka nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 480%.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan Indikator Kinerja Program :

✚ Jumlah Data Perusahaan IKM yang Masuk Ke Dalam SIINas

Indikator program ini menargetkan untuk jumlah data perusahaan IKM yang masuk ke dalam SIINas sebanyak 1 perusahaan, dengan realisasi sebanyak 85 perusahaan maka nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 8.500%.

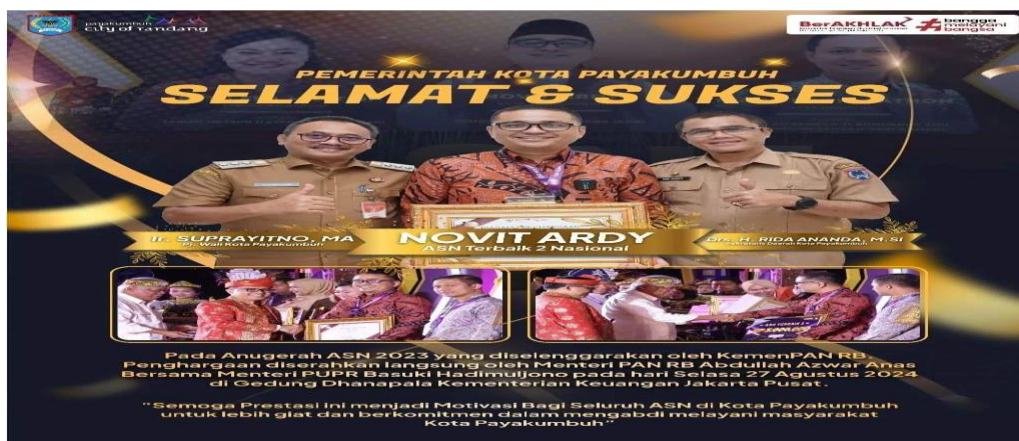
3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan

Dalam rangka penegakan disiplin pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh telah melakukan pembinaan untuk pelanggaran secara berkala dan situasional diantaranya :

- 1) Evaluasi kehadiran setiap bulan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas
- 2) Peringatan/teguran secara lisan
- 3) Peringatan/teguran secara tertulis

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki pegawai. Untuk Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai.

1. Penghargaan kepada ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh (**NOVIT ARDY, S.Sos, MM**) sebagai 3 ASN Terbaik dengan Kategori Jabatan Pengawas Terbaik Tingkat Nasional.



2. Penghargaan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh (**YUNIDA FATWA, S.Sos,MSi**), meraih penghargaan bergengsi dalam bidang pendidikan vokasi pada ajang Industrial Education and Training Expo (IDUTEX) 2024, yang digelar Senin (07/10/2024) di Jakarta.

Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian atas inovasi dan kontribusi Payakumbuh dalam mengembangkan program pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri modern.

Penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas upaya Kota Payakumbuh dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi.



BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2024 merupakan tahun ke dua dari Renstra Tahun 2023-2026. Hasil laporan dapat disimpulkan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai 3 sasaran Indikator Kinerja Utama dengan 3 indikator kinerja yang dipilih sebagai tolak ukur. Berdasarkan rencana target yang sudah dirumuskan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 jumlah 3 indikator sasaran telah dilaksanakan dengan hasil predikat sangat baik dengan tingkat ketercapaian ≤ 100 .

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 6.643.861.122,- realisasi anggaran mencapai Rp. 5.959.374.081,- atau 89,70%.

4.2. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi pada Tahun 2024 berkaitan dengan :

Urusan Ketenagakerjaan

- a) Kualitas pekerja yang relatif masih rendah, ini disebabkan karena rendahnya pendidikan atau masih ada keterampilan yang dimiliki belum sesuai dengan bidang pekerjaan yang sedang membutuhkan banyak tenaga kerja;
- b) Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja, karena masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki;
- c) Belum optimalnya penempatan dan penyerapan tenaga kerja sektor informal/usuha rumahan;
- d) Belum optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- e) Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja atau pengupahan;

- f) Belum optimalnya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- g) Belum optimalnya jaminan sosial tenaga kerja;
- h) Belum optimalnya peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan.

Urusan Perindustrian

- a) Produktifitas IKM menurun akibat kenaikan harga BBM yang mempengaruhi menurunnya permintaan pasar atas produk IKM;
- b) Kualitas produksi kurang bersaing;
- c) Sistem manajemen yang kurang baik dalam mengelola usaha;
- d) Kenaikan harga BBM, sehingga bahan baku menjadi mahal dan langka yang berpengaruh pada produktifitas IKM;
- e) Belum berkembangnya packing/kemasan industri makanan;
- f) Kurang berkembangnya teknologi permesinan di dalam negeri yang mendukung produk IKM.

4.3 Tindak Lanjut

Langkah-langkah untuk meningkatkan perbaikan lebih lanjut dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

Urusan Tenaga Kerja

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan dengan Upskilling dan Reskilling dan pemagangan;
2. Meningkatkan sertifikasi tenaga kerja dan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
3. Meningkatkan pelayanan publik melalui sistem informasi penempatan tenaga kerja Bursa Kerja Online melalui aplikasi elektronik untuk memperluas penempatan tenaga kerja;
4. Melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan;
5. Mengoptimalkan kegiatan padat karya untuk mengurangi pengangguran;
6. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
7. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dengan peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk;
8. Melakukan pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan norma keselamatan kerja dan perlindungan hukum

tenaga kerja dalam dan luar negeri;

9. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui pembinaan dan pemantauan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta norma kerja.

Urusan Perindustrian

1. Meningkatkan pemasaran produk unggulan;
2. Meningkatkan kualitas pengrajin IKM;
3. Meningkatkan pengembangan packing/kemasan industri makanan;
4. Meningkatkan sarana dan kualitas SDM IKM;
5. Meningkatkan jumlah pasar dalam kondisi baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan evaluasi kinerja yang akan datang.

Payakumbuh, Desember 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh



MUDA FATWA, S.Sos,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670601 198809 2 001

LAMPIRAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUNIDA FATWA, Sos.M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. SUPRAYITNO, MA**
Jabatan : **Pj. Wali Kota Payakumbuh**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Ir. SUPRAYITNO, MA

Payakumbuh, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

YUNIDA FATWA, S.Sos. M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	93,75%
2.	Meningkatnya produksi industri pengolahan	Persentase peningkatan nilai produksi	3,25%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	A

Untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja didukung dengan Program Anggaran dan Inovasi sebagai berikut :

A. Program

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.429.976.208,-	APBD
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.240.592.100,-	APBD
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 139.284.458,-	APBD
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 27.738.750,-	APBD
5.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 1.137.154.750,-	APBD
6.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 61.899.300,-	APBD
7.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 78.696.950,-	APBD
	TOTAL	Rp. 6.643.861.122,-	

B. Inovasi :

1. Cinta Kessing (Ciptakan Tenaga Kerja Siap Saing)
2. Klinik Anisa (Klinik Analisis Usaha)
3. Marandang Day

Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,



Ir. SUPRAYITNO, MA

Payakumbuh, Oktober 2024
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN



YUNIDA FATWA, S.Sos.M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DONISA PUTRA, S.Sos**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **YUNIDA FATWA, Sos.M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

YUNIDA FATWA, S.Sos.M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001

Payakumbuh, Oktober 2024
PIHAK PERTAMA

DONISA PUTRA, S.Sos
NIP. 19740602 199703 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan internal kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Nilai IKM	91
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang selaras dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	80%
		Persentase capaian realisasi keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	80%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.429.976.208,-	APBD
	TOTAL	Rp. 3.429.976.208,-	

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,



YUNIDA FATWA, S.Sos.M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001

Payakumbuh, Oktober 2024
SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



DONISA PUTRA, S.Sos
NIP. 19740602 199703 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZH. AWALIBI MASRIL, S.Sos**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DONISA PUTRA, S.Sos**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

DONISA PUTRA, S.Sos
NIP. 19740602 199703 1 001

Payakumbuh, Oktober 2024
PIHAK PERTAMA

ZH. AWALIBI MASRIL, S.Sos
NIP. 19840614 200604 1 008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 %
2.	Meningkatnya kualitas SDM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Persentase pemenuhan ASN dalam Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	80 %
		Persentase ASN yang hadir tepat waktu	98 %
		Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100 %
3.	Meningkatnya kualitas dokumen pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik	80 %
4.	Meningkatnya layanan kepegawaian	Persentase ASN yang dokumen kepegawaiannya lengkap	100 %
		Persentase pengurusan KGB ASN tepat waktu	100 %
		Persentase pengurusan kenaikan pangkat ASN tepat waktu	100 %

SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,



DONISA PUTRA, S.Sos
NIP. 19740602 199703 1 001

Payakumbuh, Oktober 2024
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



ZH. AWALIBI MASRIL, S.Sos
NIP. 19840614 200604 1 008



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEWI AFRIANTI, SE**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DONISA PUTRA, S.Sos**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

DONISA PUTRA, S.Sos
NIP. 19740602 199703 1 001

Payakumbuh, Oktober 2024
PIHAK PERTAMA

DEWI AFRIANTI, SE
NIP. 19741216 200701 2 020

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya realisasi keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	80%
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Persentase capaian kinerja Program/Kegiatan	80%

SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN,



DONISA PUTRA, S.Sos
NIP. 19740602 199703 1 001

Payakumbuh, Oktober 2024
KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN



DEWI AFRIANTI, SE
NIP. 19741216 200701 2 020



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIKO EKAPUTRA, SE., MM.**

Jabatan : **Kepala Bidang Tenaga Kerja**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **YUNIDA FATWA, S.Sos,M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

YUNIDA FATWA, S.Sos,M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001

Payakumbuh, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA

RIKO EKAPUTRA, SE.,MM.
NIP. 19790426 201406 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 BIDANG TENAGA KERJA
 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kesempatan kerja	1. Persentase penempatan Tenaga Kerja Formal	41 %
		2. Persentase penyerapan Tenaga Kerja Informal	48 %
2.	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	47 %
3.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terlindungi	4 %

Untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja didukung dengan Program Anggaran dan Inovasi sebagai berikut :

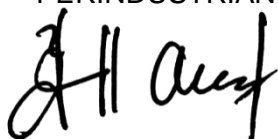
A. Program

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.211.831.900,-	APBD
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 139.284.458,-	APBD
3.	Program Hubungan Industrial	Rp. 27.738.750,-	APBD
	TOTAL	Rp. 1.378.855.108,-	

B. Inovasi :

1. Cinta Kessing (Ciptakan Tenaga Kerja Siap Saing)

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,



YUNIDA FATWA, S.Sos,M.Si
 NIP. 19670601 198809 2 001

Payakumbuh, Oktober 2024
 KEPALA BIDANG TENAGA KERJA



RIKO EKAPUTRA, SE.,MM.
 NIP. 19790426 201406 1 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ELYA HARMI, S.Sos.,MM.**
Jabatan : **Kepala Bidang Perindustrian**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **YUNIDA FATWA, Sos.M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
Kota Payakumbuh

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

YUNIDA FATWA, S.Sos.M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001

Payakumbuh, Oktober 2024
PIHAK PERTAMA

ELYA HARMI, S.Sos.,MM.
NIP. 19841001 200501 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PERINDUSTRIAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kapasitas Industri Pengolahan	Persentase peningkatan kapasitas industri pengolahan	6,97 %
2.	Meningkatnya Kualitas Produksi Industri Pengolahan	Persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu produk	7,44 %

Untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja didukung dengan Program Anggaran dan Inovasi sebagai berikut :

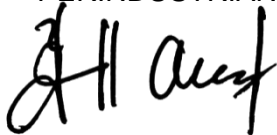
A. Program

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 1.137.154.750,-	APBD
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 61.899.300,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 78.696.950,-	APBD
	TOTAL	Rp. 1.277.751.000,-	

B. Inovasi :

1. Klinik Anisa (Klinik Analisis Usaha)

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN,



YUNIDA FATWA, S.Sos. M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001

Payakumbuh, Oktober 2024
KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN



ELYA HARMI, S.Sos.,MM.
NIP. 19841001 200501 2 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RENDI PRATAMA, S.I.A**
Jabatan : **Fungsional Penyuluh Perindustrian**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ELYA HARMI, S.Sos.,MM.**
Jabatan : **Kepala Bidang Perindustrian**
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

ELYA HARMI, S.Sos.,MM.
NIP. 19841001 200501 2 001

Payakumbuh, Oktober 2024
PIHAK PERTAMA

RENDI PRATAMA, S.I.A
NIP. 19880907 201101 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN
BIDANG PERINDUSTRIAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM Industri Pengolahan	Persentase SDM industri pengolahan yang kompeten	6,97 %
2.	Meningkatnya Standardisasi Mutu Produk Industri Pengolahan	Jumlah produk industri yang mendapatkan sertifikat industri	44
3.	Meningkatnya Penerapan Teknologi Industri Pengolahan	Persentase industri pengolahan yang menerapkan teknologi	4,07 %

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri.	Rp. 649.650.792,-	APBD
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya industri	Rp. 35.160.200,-	APBD
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Rp. 452.343.758,-	APBD
2.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Rp. 61.899.300,-	APBD
3	Penyediaan Informasi industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/kota		

	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp. 78.696.950,-	APBD
	TOTAL	Rp. 1.277.751.000,-	

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN,



ELYA HARMI, S.Sos.,MM.
NIP. 19841001 200501 2 001

Payakumbuh, Oktober 2024
FUNGSIONAL PENYULUH
PERINDUSTRIAN



RENDI PRATAMA, S.I.A
NIP. 19880907 201101 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOVIT ARDY. S.Sos,MM**
Jabatan : **Kepala UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **YUNIDA FATWA, Sos.M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

YUNIDA FATWA, S.Sos. M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001

Payakumbuh, Oktober 2024
PIHAK PERTAMA

NOVIT ARDY, S.Sos. M.M
NIP. 19800620 200901 1 013

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Industri Pengolahan	Persentase sarana dan prasarana industri pengolahan dalam kondisi baik	75%

Untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja didukung dengan Program Anggaran dan Inovasi sebagai berikut :

A. Program

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	APBD
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp. 528.518.606,-	APBD
	TOTAL	Rp. 528.518.606,-	

B. Inovasi :

1. Marandang Day

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN,



YUNIDA FATWA, S.Sos.M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001

Payakumbuh, Oktober 2024
KEPALA UPTD PUSAT PELAYANAN DAN
PENGEMBANGAN RENDANG



NOVIT ARDY, S.Sos. MM
NIP. 19800620 200901 1 013



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RENDY ROZENO, A.Md**
Jabatan : **Kasubag Tata Usaha UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NOVIT ARDY, S.Sos. MM**
Jabatan : **Kepala UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang**

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

NOVIT ARDY, S.Sos. MM
NIP. 19880907 201101 1 002

Payakumbuh, Oktober 2024
PIHAK PERTAMA

RENDY ROZENO, A.Md
NIP. 19871209 201101 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBAG TATA USAHA UTPD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Industri Pengolahan	Persentase sarana dan prasarana industri pengolahan yang dipelihara	75%

KEPALA UPTD PUSAT PELAYANAN DAN
PENGEMBANGAN RENDANG,



NOVIT ARDY, S.Sos. MM
NIP. 19880907 201101 1 002

Payakumbuh, Oktober 2024
KASUBAG TATA USAHA UTPD PUSAT
PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN
RENDANG




RENDY ROZENO, A.Md
NIP. 19871209 201101 1 001

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,75%
2. Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,25%
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A

Payakumbuh, Desember 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh




NIDA FATWA, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670601 198809 2 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jln. Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara
Telp/Fax. (0752) 7971800 Email : disnakerprin@gmail.com Website : <https://disnakerin.payakumbuhkota.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 560/49/KEPT-DTKP/2023

T E N T A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023 - 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing ;
- b. bahwa dalam perkembangannya sejalan dengan kebutuhan teknis dalam rangka melaksanakan evaluasi akuntabilitas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu dilakukan penyesuaian dengan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 060.2/177/Wk-Pyk/2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan kembali Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 060.2/177/Wk-Pyk/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan

- Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Republik Indonesia dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
 11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah daerah;
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
5. IKU OPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis OPD;
6. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh;
7. Kinerja Organisasi Adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi yang megindikasikan tingkat keberhasilan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

1. Ruang lingkup IKU yang tercantum dalam surat keputusan ini adalah IKU OPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
2. IKU OPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

BAB III

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

1. Penetapan IKU OPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan rencana strategis OPD Tahun 2012-2017;
2. IKU OPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas;
3. Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
 - a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6


Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Surat keputusan ini dilakukan oleh Kepala OPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 16 Maret 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH



VENIDA FATWA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670601 198809 2 001

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bpk PJ Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
2. Sdr. Inspektorat Kota Payakumbuh
3. Arsip

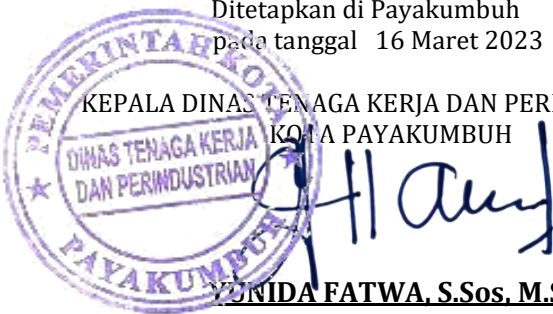
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
 Nomor : 560/ 49/KEPT-DTKP/2023
 Tanggal : 16 Maret 2023
 Tentang : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan
 Perindustrian Kota Payakumbuh

**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Cara Pengukuran	Sumber Data
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	Memenuhi SPM Kementerian Ketenagakerjaan	Jumlah penduduk usia kerja yang bekerja Tahun n di bagi jumlah angkatan kerja tahun n kali seratus persen	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	Memenuhi SPM Kementerian Perindustrian	Nilai Produksi Th n - Nilai Produksi Th n-1 di bagi Nilai Produksi Th n-1 kali seratus persen	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Ditetapkan di Payakumbuh
 pada tanggal 16 Maret 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
 KOTA PAYAKUMBUH



NIDA FATWA, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670601 198809 2 001

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

Kota : Payakumbuh


Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,75%	95,13%	101,47%
2.	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,25%	6%	184,62%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A	A	100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 Rp. 6.643.861.122,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 Rp. 5.959.374.081,-

Payakumbuh, Januari 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh



UNIDA FATWA, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670601 198809 2 001